

**DEFISIT ANGGARAN PEMERINTAH DAN INFLASI
SELAMA ERA MIGAS DI INDONESIA
(1974/75 - 1986/87)**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	02-12-93
Asal dari	-
Fanyaknya	1 (satu) eks.
Harga	Hardik
No. Inventaris	93 01 12 0950
No. K.as	

OLEH

EVIE LILIANA ✓

Nomor Mahasiswa ; 85 01 195

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1993

DEFISIT ANGGARAN PEMERINTAH DAN INFLASI
SELAMA ERA MIGAS DI INDONESIA
(1974/75 - 1986/87)

Oleh

EVIE LILIANA

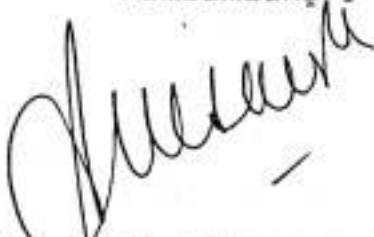
Nomor Mahasiswa : 85 01 195


SKRIPSI SARJANA LENGKAP UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT GUNA MENCAPAI
GELAR SARJANA EKONOMI JURUSAN STUDI PEMBANGUNAN
PADA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

DISETUJUI OLEH

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. A. Madjid Sallatu, MA.


Drs. H. F. Ruru

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Rabbul Alamin atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan guna menempuh salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi penulis pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Secara sadar penulis harus mengakui bahwa terselesainya penulisan skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan yang diberikan berupa moril maupun material. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan tersebut. Tanpa mengurangi rasa terima kasih penulis kepada pihak yang telah memberikan bantuannya, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. A. Madjid Sallatu, MA dan Bapak Drs. H.F. Ruru yang masing-masing bertindak sebagai konsultan penulis, di mana beliau telah banyak berkorban waktu, tenaga dan pemikiran guna membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Dr. H.A. Karim Saleh dan Drs. Nuhun Ahmad, MS serta Ibu Dra. Laly Jauhariah Siregar, MS masing-masing sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dan Penasehat Akademik penulis.

3. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas academica Universitas Hasanuddin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi pada khususnya yang selama penulis duduk pada bangku kuliah telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat besar gunanya.
4. Bapak Kepala Kantor Bank Indonesia Sulawesi Selatan beserta seluruh karyawannya yang telah memberikan fasilitas dan kekeluasan dalam pengumpulan data bagi kelengkapan skripsi ini.
5. Terkhusus, sembah sujud dan baktiku kepada Ayah dan Bunda yang telah mendidik, membimbing dan memberikan dorongan serta bantuan, baik moril maupun material sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan sampai dengan perguruan tinggi dan hingga sampai pada penyelesaian skripsi ini. Demikian pula kepada saudara-saudaraku yang tercinta.
6. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada sahabat-sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, dengan lapang dada penulis akan menerimanya sebagai suatu koreksi dan perbaikan yang mengarah, setidaknya kearah kesempurnaan.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Ujung Pandang, Agustus 1993

P e n u l i s

DAFTAR ISI

B A B		Halaman
	HALAMAN JUDUL	i
	HALAMAN PENGESAHAN	ii
	KATA PENGANTAR	iii
	DAFTAR ISI	vi
	DAFTAR TABEL	ix
	DAFTAR GRAFIK	xi
	DAFTAR LAMPIRAN	xii
I.	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Rumusan Masalah	4
	1.3. Tujuan dan Kegunaan	6
	1.4. Sistematika Pembahasan	7
II.	KERANGKA TEORITIS DAN KEPUSTAKAAN	9
	2.1. Definisi Inflasi	9
	2.2. Sebab-sebab Terjadinya Inflasi	11
	2.2.1. Teori Kuantitas Uang Sederhana..	11
	2.2.2. Analisis Ortodoks Tentang Inflasi	15
	2.2.2.1 Demand-Pull Theories of Inflation	16
	2.2.2.2 Supply-side Theories of Inflation	18
	2.2.2.3 Demand-Supply Theories of Infation.....	21
	2.2.3. Pandangan Golongan Moneteris dan Golongan Strukturalis	23
	2.3. Studi Untuk Indonesia.....	32
	2.3.1. Studi Anwar Nasution	32
	2.3.2. Studi Anton Hermanto Gunawan ...	36

B A B	Halaman
III. METODOLOGI	40
3.1. Landasan Teoritik	40
3.1.1. Kerangka Konseptual	40
3.2. Metodologi Penelitian	42
3.2.1. Hipotesis	42
3.2.2. Model Analisis	43
3.2.2.1. Model Ekonometri	43
3.2.2.2. Bentuk-Bentuk Pengujian	45
3.2.2.3. Metode Penarikan Kesimpulan	45
3.2.3. Pembatasan Variabel-variabel dan Sumber Data	46
3.2.3.1. Tingkat Harga Umum Domestik (P_t)	46
3.2.3.2. Defisit Domestik Anggaran Pemerintah ($DDAP_t$)	47
3.2.3.3. Tingkat Harga Internasional (IHI_t)	47
3.2.3.4. Fluktuasi Nilai Tambah Bahan Makanan ($ITBM_t$)	48
3.2.3.5. Fluktuasi Nilai Tambah Minyak Bumi (IPR_t)	48
IV. INFLASI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI INDONESIA	50
4.1. Indikator Inflasi dan Perkembangannya	50
4.1.1. Indikator Inflasi	50
4.1.2. Perkembangan Inflasi	51
4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia	55
4.2.1. Jumlah Uang Beredar	55
4.2.2. Defisit Domestik Anggaran Pemerintah	65
4.2.3. Inflasi yang Diimpor	80
4.2.4. Produksi Bahan Makanan	83
4.2.5. Produksi Minyak dan Gas Bumi	85

B A B	Halaman
4.3. Tinjauan Perkembangan Kebijakanaksanaan Ekonomi di Indonesia Tahun 1974/75 - 1986/87	87
4.3.1. Perkembangan Kebijakanaksanaan Anggaran	87
4.3.1.1. Kebijakanaksanaan Penerimaan Pemerintah	87
4.3.1.2. Kebijakanaksanaan Penge- luaran Pemerintah	91
4.3.2. Perkembangan Kebijakanaksanaan Eko- nomi Lainnya	95
V. ANALISIS PENAKSIRAN MODEL INFLASI INDONESIA TAHUN 1974/75 - 1986/87	102
5.1. Analisis Hasil Regresi	102
5.1.1. Analisis Ekonometri	102
5.1.2. Analisis Ekonomi	103
VI. PENUTUP	114
6.1. Kesimpulan	114
6.2. Saran - saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN - LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Indeks Biaya Hidup/Indeks Harga Konsumen Indonesia 1974/75 - 1986/87	54
4.2. Indonesia : Perkembangan Laju Inflasi Tahunan, 1974/75 - 1986/87	54
4.3. Indonesia : Perkembangan Jumlah uang Beredar (M1), Komponennya dan Uang Luas (M2), 1974/75 - 1985/1987	56
4.4. Indonesia : Perubahan Sebab-sebab yang Mempengaruhi Jumlah Uang Beredar, 1974/75-1986/1987	61
4.5. Indonesia : Tingkat Perubahan Jumlah Uang Beredar (M1) Akibat Aktiva Luar Negeri Netto dan Tagihan Netto pada Pemerintah Pusat, 1974/75 - 1986/87	62
4.6. Indonesia : Perkembangan Komposisi Penerimaan Pemerintah, 1974/75 - 1986/87	67
4.7. Indonesia : Realisasi Anggaran Pemerintah 1974/75 - 1986/87	69
4.8. Indonesia : Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah 1974/75 - 1986/87	72
4.9. Indonesia : Total Penerimaan Pemerintah, Penerimaan Luar Negeri dan Penerimaan Domestik, 1974/75 - 1986/87	74
4.10. Indonesia : Perkiraan Komponen Luar Negeri dan Domestik dari Anggaran dan Pengeluaran Pemerintah, 1974/75 - 1986/87	76
4.11. Indonesia : Pengeluaran Luar Negeri, 1974/75 - 1986/87	77
4.12. Indonesia : Total Pengeluaran, Pengeluaran Luar Negeri dan Pengeluaran Domestik, 1974/75 - 1986/87	78
4.13. Indonesia : Penerimaan Domestik, Pengeluaran Domestik dan Defisit Domestik Anggaran Pemerintah, 1974/75 - 1986/87 ...	79

Tabel	Halaman
4.14. Indonesia : Perkembangan Indeks Harga Internasional, Sebelum dan Setelah Disesuaikan dengan Perubahan Kurs US\$, 1974/75 - 1986/87	82
4.15. Indonesia : Perkembangan Nilai Tambah Produksi Tanaman Bahan Makan, Trend Jangka Panjang dan Indeks Fluktuasinya, 1974/75 - 1986/87	84
4.16. Indonesia : Perkembangan Nilai Tambah Produksi Pertambangan dan Penggalian, Trend Jangka Panjang dan Indeks Fluktuasinya, 1974/75 - 1986/87	86
5.1. Hasil Regresi 6 Persamaan	99
5.2. Hasil Regresi 2 Persamaan	101
5.3. Nilai Batas Kritis untuk Student Test (t-test) dan untuk Fisher Test (F-test) ..	102
5.4. Perkiraan Pengaruh Perubahan Variabel Bebas pada Tingkat Harga Umum (P_t), 1974/75 - 1986/87 (Persamaan 1)	106
5.5. Perkiraan Pengaruh Perubahan Variabel Bebas pada Tingkat Harga Umum (P_t), 1974/75 - 1986/87 (Persamaan 2)	107

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
2.1. Proses Terjadinya Inflasi Menurut Per- samaan Pertukaran (Aliran Klasik)	13
2.2. Demand-Side Inflation	18
2.3. Supply-Side Inflation	19
2.4. Demand-Supply Inflation	22
4.1. Perkembangan Laju Inflasi Tahunan, 1974/75 - 1986/87	55
4.2. Perkembangan Jumlah Uang Beredar (M_1), Komponennya dan Peran Masing-masing Komponen, 1974/75 - 1986/87	58
4.3. Laju Pertumbuhan Tahunan Jumlah Uang Beredar (M_1), Komponennya dan Peran Masing-masing Komponen, 1974/75 - 1986/87.	60
4.4. Indonesia : Indeks Perkembangan Jumlah Uang Beredar (IM_1) Pengeluaran Rutin (IP_R), Pengeluaran Pembangunan (IP_P) dan Total Pengeluaran Pemerintah (IP_T), 1974/75 - 1986/87	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Hasil Regresi Persamaan Pertama	121
2. Hasil Regresi Persamaan Kedua	122
3. Hasil Regresi Persamaan Ketiga	123
4. Hasil Regresi Persamaan Keempat	124
5. Hasil Regresi Persamaan Kelima	125
6. Hasil Regresi Persamaan Keenam	126

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia pernah mengalami masa-masa berat dalam perekonomiannya yang disebabkan oleh sangat tingginya laju inflasi, yaitu pada masa 1966-1968 dan 1972-1974, dengan laju inflasi diatas 80 % dan 25 % pertahunnya.

Inflasi yang terlalu tinggi tersebut, menurut Tomoichiro Nakamaru¹ dapat memperburuk distribusi pendapatan (yang tidak seimbang), mengurangi tabungan domestik yang merupakan sumber dana investasi bagi negara-negara berkembang, mengakibatkan terjadinya defisit neraca perdagangan, meningkatkan besarnya utang luar negeri, dan menimbulkan ketidakstabilan politik.

Berdasarkan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh inflasi itu, orang sering mengartikan inflasi sebagai keadaan di mana harga-harga barang demikian tinggi, atau dengan kata lain, membumbungnya tingkat harga.

1. Tomoichiro Nakamaru, *Inflation in the Republic of Korea, the Philippines and Indonesia*, EXIM Bank Review, vol. 4, no. 1, Tokyo, Japan, October 1983.

Gejala perkembangan inflasi memang sama untuk semua perekonomian dalam semua periode. Akan tetapi sebagaimana berbagai studi menunjukkan, unsur-unsur penyebab dari proses ini tidaklah sama untuk perekonomian yang satu dengan yang lain, atau untuk satu periode dibandingkan dengan yang lain.

Mengamati inflasi di Indonesia, atau perekonomian Indonesia pada umumnya harus memperhatikan kenyataan eratny kaitan antara dunia finansial dengan anggaran negara (APBN) serta antara keduanya dengan sektor luar negeri (neraca pembayaran).² Besarnya penerimaan migas dalam APBN dan sistem penyusunannya yang memasukkan nilai rupiah pinjaman dan bantuan luar negeri sebagai penerimaan APBN. Hal ini menyebabkan eratny kaitan antara sektor anggaran dan sektor luar negeri atau neraca pembayaran. Dominasi struktur finansial oleh perbankan dan sistem pengaturan devisa -- semula kurs tetap kemudian diambangkan terkendali -- menyebabkan eratny kaitan antara penciptaan likuiditas dengan neraca pembayaran. Proses penyusunan program (anggaran) perkreditan dan APBN dalam suatu perencanaan finansial menyebabkan eratny kaitan moneter perbankan dengan anggaran.

2. Anton Herman Gunawan, Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia, PAU-Ekonomi-UI, Jakarta, 1991, hlm. XXV.

Kaitan-kaitan tersebut menyebabkan bahwa perkembangan dan proses yang terjadi pada dunia moneter di Indonesia terkait erat dengan neraca pembayaran dan APBN. Inflasi yang dari sudut pandang analisa moneter, pada dasarnya suatu fenomena moneter, di Indonesia juga terkait dengan perkembangan anggaran serta perkembangan dalam neraca pembayaran.

Perekonomian Indonesia yang cukup terbuka dan juga peran pemerintah sebagai agent of development yang sangat besar, terutama melalui peralatan anggarannya. Terlebih lagi sejak tahun 1974, ketergantungan pada hasil ekspor yang sebagian besar dalam bentuk minyak dan gas bumi serta hasil-hasil pertanian masih sangat besar. Sementara investasi dalam negeri masih memerlukan barang modal yang harus diimpor. Di lain pihak, mobilisasi dana untuk pembangunan cukup sulit sehingga peran bantuan atau pinjaman luar negeri masih terus dibutuhkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar bersumber pada penerimaan Pajak Perseroan minyak (PPs minyak). PPs minyak yang menurut APBN termasuk dalam kelompok Penerimaan Dalam Negeri, seharusnya bila ditinjau dari subyek pajak dan pengaruhnya terhadap daya beli perekonomian domestik kurang tepat masuk kelompok penerimaan domestik. Guna dapat membelanjakan komponen penerimaan non-domestik (PPs minyak dan bantuan/pinjaman luar

negeri) di dalam negeri haruslah berhati-hati, karena akan mempunyai dampak terhadap jumlah uang beredar (induced money stock increase) sehingga cenderung inflatoir. Kalaupun dibelanjakan di luar negeri, perlu diperhatikan pula pengaruh terjadinya inflasi yang diimpor (imported inflation). Akibatnya pembangunan yang dilakukan harus disertai dengan tekanan kemampuan pembiayaan dan tingkat harga umum.

Dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut, maka penulis mempunyai praduga bahwa defisit domestik anggaran pemerintah merupakan sumber utama inflasi di Indonesia, di samping faktor eksternal dan struktural.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia, sebagaimana halnya negara berkembang lainnya juga menghadapi berbagai hambatan struktural dalam perkonomiannya, seperti inelastisnya penawaran bahan makanan (terutama beras) atau hambatan di dalam valuta asing dan terutama hambatan finansial.

Hambatan finansial tercermin dalam hal terjadinya defisit domestik anggaran pemerintah. Sektor swasta yang belum kuat menyebabkan peran anggaran pemerintah sangat menentukan dalam investasi masyarakat. Tetapi rupanya peran pengeluaran pemerintah yang besar dalam investasi masyarakat itu tak dapat

diimbangi oleh penerimaannya, sehingga timbul kesenjangan pendapatan belanja negara itu atau timbulnya defisit struktural dalam keuangan negara.

Hambatan valuta asing dapat dicerminkan oleh arus modal yang cukup besar serta inelastisnya produksi bahan makanan juga berkaitan dengan timbulnya hambatan valuta asing dan finansial. Munculnya komoditi minyak bumi sebagai sumber penerimaan pemerintah dan valuta asing memberikan berkah sekaligus menimbulkan masalah baru yang terbawa bersamanya, yaitu timbulnya monetisasi penerimaan luar negeri yang menyebabkan ekspansi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tekanan inflasi.

Empat faktor utama yang tampaknya cukup mempengaruhi perkembangan tingkat harga umum Indonesia adalah defisit domestik anggaran pemerintah, produksi minyak bumi, tingkat harga dunia serta produksi bahan makanan di dalam negeri.

Masalahnya, berapa besar pengaruh defisit anggaran belanja pemerintah terhadap inflasi. Juga berapa besar faktor-faktor lainnya seperti produksi bahan makanan dan produksi minyak bumi serta tingkat harga dunia mempengaruhi inflasi di Indonesia.

Pembahasan masalah dalam penulisan ini dibatasi dalam jangka waktu tiga belas tahun, yaitu selama periode 1974 / 75 - 1986 / 1987.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh defisit domestik anggaran pemerintah terhadap tingkat harga umum domestik
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh tingkat harga internasional terhadap tingkat harga umum domestik
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh fluktuasi produksi bahan makanan dan fluktuasi produksi minyak dan gas bumi terhadap tingkat harga umum domestik.

Kegunaan Penelitian :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat diketahui besarnya peran defisit domestik anggaran pemerintah, tingkat harga internasional, fluktuasi produksi bahan makanan, fluktuasi produksi minyak dan gas bumi dalam menentukan tingkat harga umum domestik di Indonesia.
2. Secara umum, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan rujukan bagi kebijaksanaan ekonomi yang telah ditetapkan selama ini, khususnya bagi kebijaksanaan stabilisasi harga.
3. Secara khusus, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai alat estimasi untuk tahun selanjutnya bagi variabel tingkat harga umum domestik.

1.4 Sistematika Pembahasan

Penulis akan menyajikan pembahasan skripsi ini dalam enam bab ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka. Urutan penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua : Merupakan bab teori yang membahas tentang konsep-konsep teori yang berkenaan atau berhubungan dengan pembahasan yaitu teori tentang inflasi, sebab-sebab terjadinya inflasi menurut Teori Kuantitas Uang Sederhana, Analisis Ortodoks dan Pandangan Golongan Monetaris dan Golongan Strukturalis serta Studi untuk Indonesia.

Bab ketiga : Menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penulisan. Bab ini terdiri dari kerangka konseptual, hipotesis, model analisis dan pembatasan variabel.

Bab keempat : Merupakan bab yang membahas tentang inflasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia. Akan dikemukakan indikator inflasi dan

perkembangannya, juga secara detail faktor-faktor yang meliputi jumlah uang beredar, defisit domestik anggaran pemerintah, faktor-faktor dalam penawaran agregat dan luar negeri, seperti inflasi yang diimpor, produksi bahan makanan, produksi minyak dan gas bumi dalam mempengaruhi inflasi di Indonesia. Juga akan dibahas tinjauan perkembangan kebijaksanaan ekonomi di Indonesia.

Bab kelima : Merupakan bab analisis penaksiran model inflasi Indonesia selama periode 1974/75 - 1986/1987, yang meliputi analisis ekonometri dan analisis ekonominya.

Bab keenam : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN STUDI KEPUSTAKAAN

2.1 Defenisi Inflasi

Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi tentang inflasi yang ada.

A.P. Lerner menyatakan bahwa inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan (excess demand) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan.¹ Kelebihan permintaan akan barang-barang ini dapat diartikan sebagai berlebihnya tingkat pengeluaran (level of spending) untuk komoditi akhir dibandingkan dengan tingkat output maksimum yang dapat dicapai dalam jangka panjang, dengan sumber-sumber produksi tertentu. Ditinjau dari sisi lain, kelebihan permintaan tersebut juga diartikan sebagai too much money is chasing too few goods, yang ditafsirkan ganda yaitu :

1. Pengeluaran yang diharapkan terlalu banyak bila dibandingkan dengan barang yang tersedia, atau
2. Barang yang tersedia terlalu sedikit bila dibandingkan dengan tingkat pengeluaran yang diharapkan.

1. A.P. Lerner, "The Inflationary Process", *Review of Economics and Statistics*, August 1949, hlm. 193-195, seperti dikutip dari A.J. Hagger, *Inflation : Theory and Policy*, MacMillan, London, 1977, hlm. 1.

Definisi lainnya dikemukakan oleh F.W. Paish yang mengatakan :

In inflation, money incomes are being inflated relative to real potential GNP.²

Pendapatan nominal meningkat jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan peningkatan arus barang dan jasa yang dibeli (pendapatan nasional riil).

Kedua definisi di atas dapat dibedakan dalam hal bahwa Paish dalam definisinya mengemukakan variabel pendapatan uang agregat yang dibandingkan dengan GNP potensial riil, sedangkan Lerner menekankan pada pengeluaran agregat yang dibandingkan dengan GNP potensial riil.

Venieris dan Sebold³ mendefinisikan inflasi sebagai :

a sustained tendency for the general level of price to rise over time.

Di dalam definisi inflasi tersebut tercakup tiga aspek, yaitu

1. Adanya "kecenderungan" (tendency) harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi / aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya,

2. F.W. Paish, *Rise and Fall of Incomes Policy*, London : Institute of Economic Affairs, 1969, hlm. 20, seperti dikutip dalam A.J. Hagger (1977), *op.cit.*, hlm. 2.

3. Y.P. Venieris dan F. D. Sebold, *Macroeconomic Models and Policy*, Jhon Wiley & Sons Inc., New York, 1977, hlm. 603

tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

2. Peningkatan harga tersebut berlangsung "terus-menerus" (sustained), yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja.
3. Mencakup pengertian "tingkat harga umum" (general level of prices), berarti tingkat harga yang meningkat itu bukan hanya pada satu / beberapa komoditi saja.

2.2 Sebab-Sebab Terjadinya Inflasi

Faktor-faktor apa saja yang dapat memungkinkan terjadinya inflasi akan dibahas berikut ini, dimulai dengan mengetengahkan peralatan analisis Teori Kuantitas Uang yang berdasar pada "persamaan pertukaran" (equation of exchange), dan kemudian menggunakan Orthodox Analysis of Inflation disertai dengan beberapa catatan kritik terhadap masing-masing teori.

2.2.1 Teori Kuantitas Uang Sederhana

Sebab terjadinya inflasi dapat diterangkan dengan menggunakan persamaan pertukaran menurut Irving Fisher, yaitu $MV = PT^4$, dimana MV mencerminkan total pengeluaran uang untuk barang dan jasa (total money expenditures on goods and services) dan

4. I. Fisher, *The Purchasing Power of Money*, MacMillan, New York, 1911, seperti dikutip dari buku D.G. Lockett, *Money and Banking*, second edition, McGraw Hill Kogakusha, 1977, hlm. 335 - 336

PT mencerminkan total penerimaan uang hasil penjualan barang dan jasa (total money receipts from the sale of goods and services).

M adalah jumlah uang beredar (money supply)

V adalah kecepatan peredaran uang dalam suatu periode (velocity of money)

P adalah tingkat harga rata-rata (average price level)

T adalah jumlah transaksi yang terjadi selama periode tertentu.

M atau jumlah uang beredar dianggap dapat diatur/ditentukan oleh pemerintah melalui kebijaksanaannya; jadi dianggap sebagai variabel eksogen. V atau transaction velocity of money diasumsikan konstan/stabil, tak terlalu bergejolak dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh sifat dari faktor yang menentukan besarnya velocity of money, yaitu mekanisme pembayaran upah/gaji dan kebiasaan/pola pengeluaran masyarakat yang relatif stabil/tak berubah.⁵ P atau tingkat harga dalam teori ini dianggap sebagai residual, yaitu merupakan variabel yang ditentukan oleh interaksi ketiga variabel lainnya. Teori ini juga mengasumsikan adanya fleksibilitas harga untuk bergerak naik dan turun, walaupun kenyataan memungkinkan adanya market imperfection dalam bentuk

5. Lockett (1977), op.cit., hlm. 339.

kontrol harga oleh pemerintah ataupun hal lainnya. Tingkah laku T atau transaction dalam teori ini dibedakan atas dua macam, yaitu tingkah laku dalam jangka panjang (long-run) dan tingkah laku dalam jangka pendek (short-run). Dalam jangka panjang akan selalu tercapai keadaan ekuilibrium pada tingkat pendapatan nasional full-employment. Unemployment yang terjadi pada perekonomian dalam jangka pendek, karena adanya fleksibilitas upah, akan menyebabkan terjadinya interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja sehingga akan menghilangkan unemployment tersebut, kembali ke ekuilibrium full-employment semula.

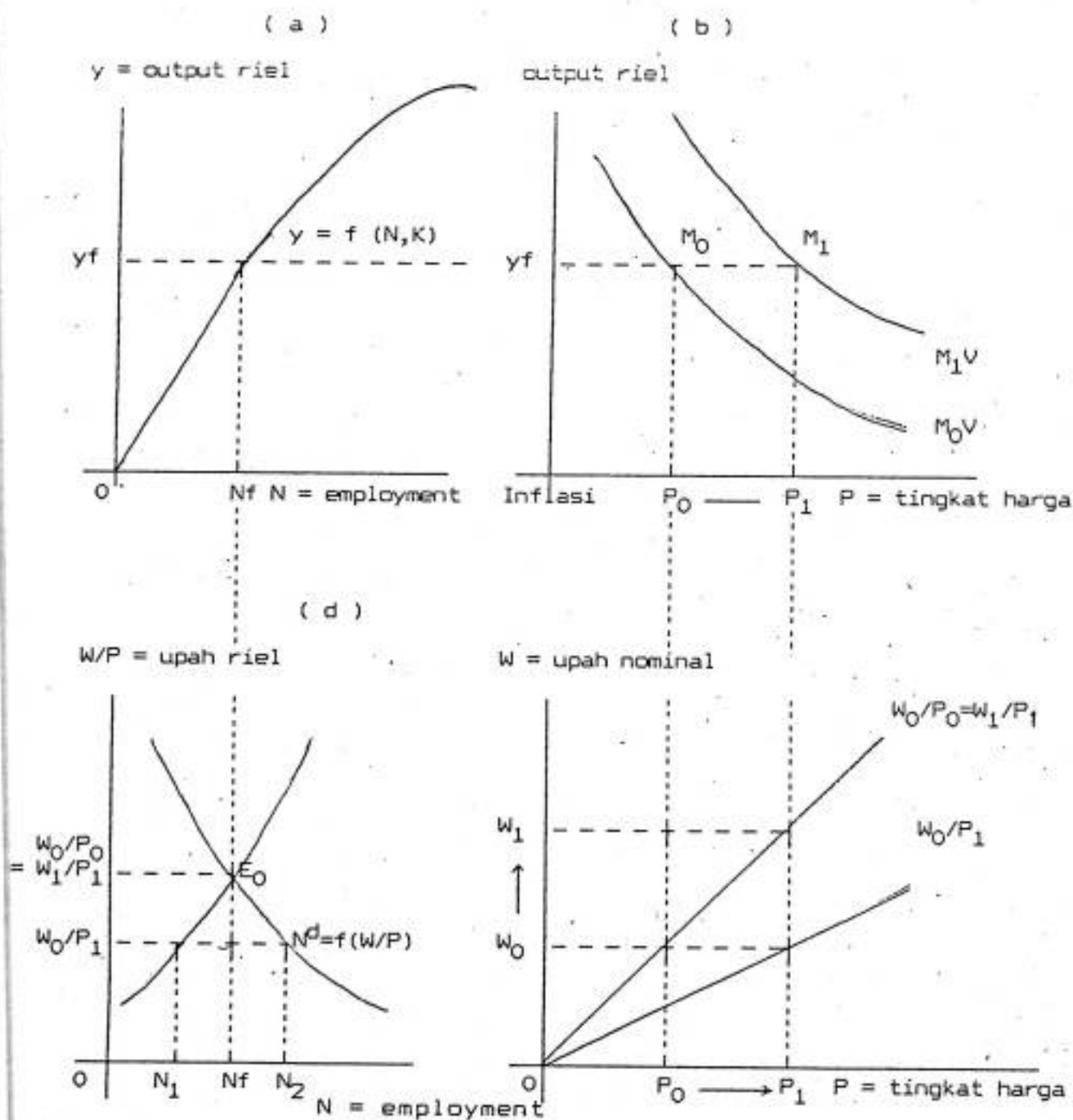
Berikut ini akan dibahas mengenai inflasi dengan peralatan di atas. Seandainya tak ada perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya transaction velocity of money (V) maupun transaction (T), maka hubungan yang ada dalam persamaan pertukaran itu hanya antara money supply (M) dan tingkat harga (P). Dengan demikian, berarti adanya perubahan jumlah uang beredar akan selalu menyebabkan terjadinya perubahan tingkat harga, bahkan secara proporsional (menurut Fisher).

Dengan menganggap bahwa T akan sama dengan Y (output riil), karena baik PT maupun PY merupakan total nominal national income, maka proses terjadinya inflasi dapat diterangkan dengan Grafik 3.1.

Grafik 3.1

Proses Terjadinya Inflasi Menurut Persamaan Pertukaran

(Aliran Klasik)



(a) : fungsi produksi nasional

(b) : persamaan pertukaran

(c) : fungsi upah riil

(d) : pasar tenaga kerja

Mula-mula keadaan ekuilibrium full-employment tercapai pada tingkat employment N_f dan tingkat upah riil W_0/P_0 , dimana upah uang sebesar W_0 dan tingkat harga adalah P_0 . Tingkat output riil full-employment sebesar Y_f dan jumlah uang beredar sebesar M_0 , sedangkan velocity of money konstan sebesar V . Adanya pertambahan jumlah uang beredar menjadi M_1 menggeser kurva MV ke kanan sehingga dengan tingkat output full-employment yang tetap Y_f , terjadi peningkatan harga menjadi P_1 . Berarti, tingkat upah riil turun menjadi W_0/P_1 . Akibatnya, terjadi excess demand di pasar tenaga kerja, yang menurut asumsi golongan klasik bahwa terdapat fleksibilitas harga dan upah, akan menyebabkan tekanan bagi tingkat upah nominal untuk naik menjadi W_1 dimana upah riil kembali ke ekuilibrium semula ($W_1/P_1 = W_0/P_0$) di pasar tenaga kerja. Pada ekuilibrium yang baru ini, setelah kenaikan jumlah uang beredar, tingkat output tetap sebesar Y_f , sedangkan tingkat upah naik menjadi W_1 dan tingkat harga pun naik menjadi P_1 . Terjadi lah inflasi yang besarnya proporsional dengan naiknya jumlah uang beredar.

2.2.2 Analisis Ortodoks Tentang Inflasi

Hampir semua ahli ekonomi sepakat bahwa sekurang-kurangnya ada dua alasan penyebab inflasi yang

dapat dikatakan sebagai gejala moneter. Pertama, inflasi yang sangat hebat di banyak negara, terutama di Amerika Latin, disebabkan oleh ekspansi yang cepat didalam jumlah uang beredar, yang diakibatkan oleh besarnya defisit anggaran pemerintah secara terus-menerus guna membiayai pembangunan, padahal penerimaan pajak tidak mencukupi. Kedua, apapun sebab terjadinya, inflasi tak dapat berlangsung terus untuk jangka waktu yang lama tanpa adanya peningkatan jumlah uang beredar.

Walaupun telah ada kesepakatan tersebut, tetapi masih terdapat pertentangan pendapat mengenai sebab utama terjadi inflasi dan mengenai proses terjadinya inflasi, sehingga Lipsey dan Steiner mencoba mengelompokkan pendapat-pendapat tersebut kedalam tiga kelompok besar teori, yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya kecenderungan aggregate demand untuk meningkat sehingga terjadi keadaan inflationary gap; teori inflasi yang menekankan pada terjadinya peningkatan aggregate supply ; dan teori inflasi yang mengatakan perihal adanya aggregate supply akibat adanya peningkatan aggregate demand.

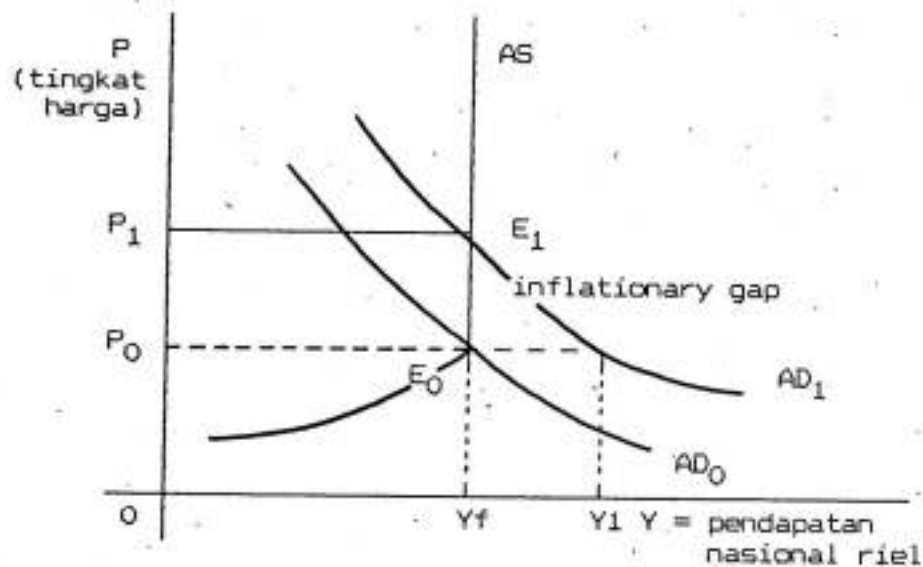
2.2.2.1 Demand-Pull Theories of Inflation

Menurut teori ini, inflasi disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang menggeser aggregate

demand. sehingga terjadi keadaan excess demand, yang merupakan inflationary gap, sehingga menekan harga untuk naik. Peningkatan aggregate demand pada situasi output full-employment akan menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan pada pasar barang dan jasa, sehingga harga barang dan jasa pun meningkat. Sementara itu, Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan terhadap faktor produksi, sehingga harga faktor produksi pun akan naik. Kenaikan harga barang dan jasa serta kenaikan harga faktor produksi inilah yang merupakan inflasi bagi perekonomian.

Sumber terjadinya peningkatan aggregate demand ini ditafsirkan berbeda oleh ahli-ahli ekonomi. Golongan Monetaris menganggapnya sebagai akibat dari peningkatan/ekspansi jumlah yang beredar. Sedang golongan non-Monetaris, yaitu Neo-Keynesian, tak menyangkal pendapat tersebut, tetapi ditambahkan bahwa peningkatan aggregate demand dapat terjadi karena adanya peningkatan pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, atau ekspor netto, walaupun tidak disertai oleh peningkatan jumlah uang beredar. Jadi bisa disimpulkan bahwa meningkatnya kurva aggregate demand dapat disebabkan oleh faktor-faktor moneter maupun faktor-faktor non-moneter.

Grafik 2.2.
Demand-Side Inflation

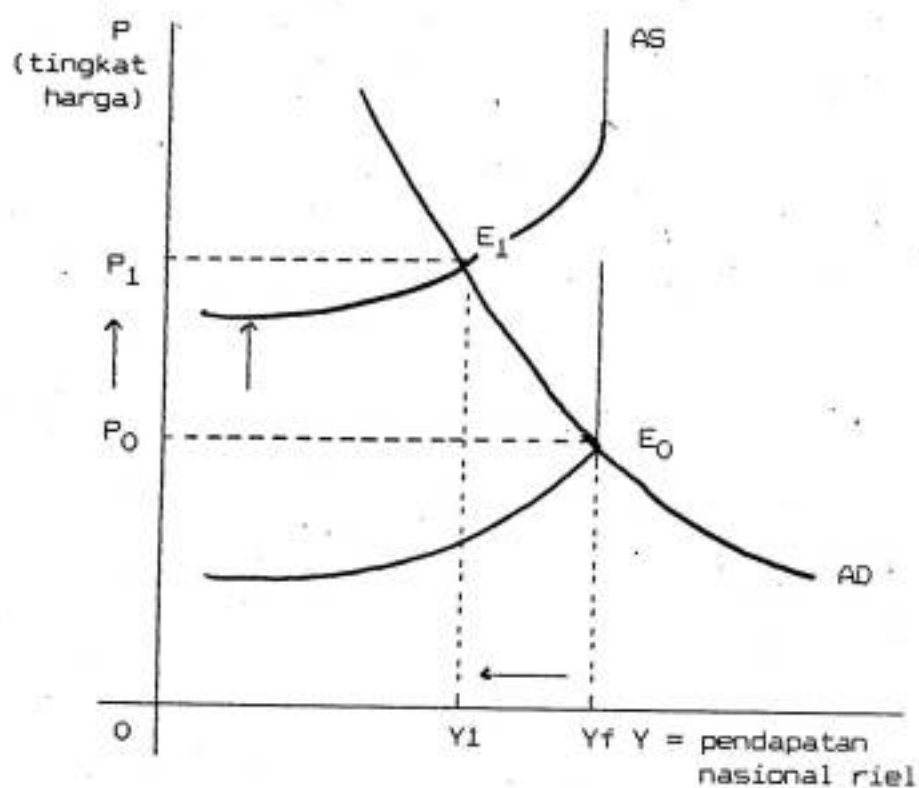


2.2.2.2 Supply-Side Theories of Inflation

Teori ini menekankan pada terjadinya pergeseran kurva agregat supply sebagai penyebab utama inflasi, disebut juga cost-push inflation atau supply shock inflation. Peningkatan kurva agregat supply tersebut menyebabkan bergesernya keadaan ekuilibrium dari E_0 ke E_1 pada tingkat harga yang lebih tinggi (P_1) dan tingkat output riil yang lebih rendah (Y_1) dari pada tingkat output full-employment (Y_f).

Faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran agregat supply ini ditafsirkan bermacam-macam, mulai dari tingkat upah, harga barang dalam negeri, harga barang impor, ataupun kekakuan struktural.

Grafik 2.3
Supply-Side Inflation



Naiknya tingkat upah, yang mendorong terjadinya inflasi ini, disebabkan oleh desakan serikat buruh kepada pengusaha yang terpaksa menuruti kehendak mereka, dengan pemikiran akan dapat mengalihkan beban kenaikan upah tersebut ke pihak konsumen melalui peningkatan harga barang. Inflasi macam ini sering disebut sebagai wage cost-push inflation. Supply-Side Inflation dapat juga terjadi karena adanya usaha dari para pengusaha yang memiliki kekuatan monopoli untuk menaikkan harga

jual outputnya guna meningkatkan profit margin. Inflasi yang disebabkan oleh peningkatan harga barang dan jasa yang disengaja oleh pengusaha ini sering disebut sebagai price-push inflation. Adanya inflasi di negara lain yang mengekspor barangnya ke Indonesia akan menyebabkan terjadinya peningkatan harga barang impor Indonesia dari negara tersebut, sehingga dapat menyebabkan inflasi. Inflasi macam ini dinamakan sebagai import cost-push inflation. Teori kekakuan struktural tentang inflasi menganggap bahwa sumber daya ekonomi tak dapat dengan cepat diubah pemanfaatannya dan juga bahwa upah dan tingkat harga mudah naik tetapi sukar untuk turun kembali. Dengan Asumsi ini, bila terjadi perubahan pola permintaan dan/atau biaya, lambat sekali terjadi penyesuaian. Mobilitas sumber daya yang rendah dalam perekonomian, dari sektor yang lemah menuju sektor yang berkembang, menyebabkan terjadinya idle capacity di sektor yang lemah dan kekurangan sumber daya yang mendorong naiknya harga di sektor yang berkembang. Adanya kekakuan harga untuk turun di sektor yang lemah disertai dengan peningkatan harga di sektor yang berkembang menyebabkan, secara keseluruhan, tingkat harga meningkat, dan ini berarti terjadi inflasi.

2.2.2.3 Demand-Supply Theories of Inflation

Adanya peningkatan aggregate demand menyebabkan kenaikan harga, yang kemudian diikuti oleh peningkatan aggregate supply, sehingga harga naik lebih tinggi lagi. Interaksi antara aggregate demand dan aggregate supply yang menekan harga untuk meningkat ini dikatakan sebagai akibat adanya harapan/perkiraan (expectation) bahwa tingkat harga dan tingkat upah akan meningkat, ataupun karena adanya kelembaban (inertia) dari inflasi masa lalu. Pendapat yang mengatakan bahwa inflasi disebabkan oleh adanya expectation itu (expectational inflation) mendasarkan pada perbandingan dan perkiraan masa depan.

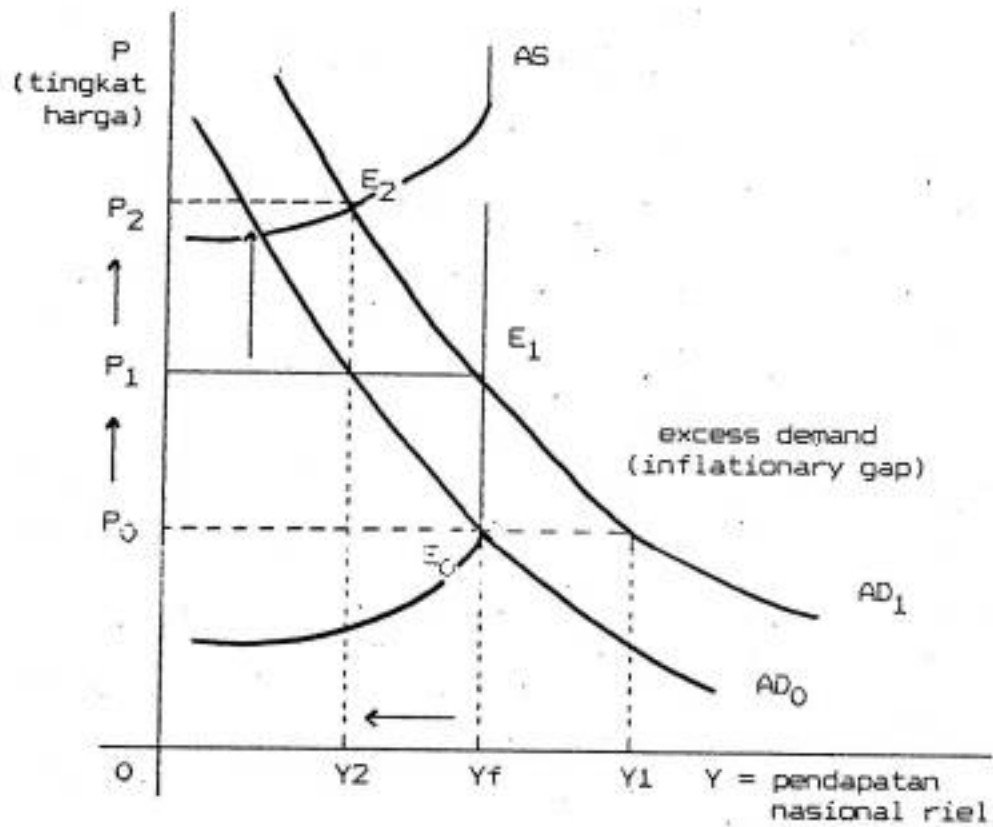
Dalam keadaan ekuilibrium full-employment E_0 , terjadi peningkatan aggregate demand dari AD_0 ke AD_1 , sehingga ekuilibrium baru terjadi pada tingkat harga yang lebih tinggi. Jika timbul harapan/perkiraan akan terjadinya inflasi, maka akan menyebabkan cost-push mendorong aggregate supply ke atas sehingga tingkat harga pun naik ke P_2 .

Meningkatnya harga setelah adanya excess demand inflation akibat dari kelembaman yang terbawa bersama inflasi tersebut dikatakan sebagai inertial inflation, dan dikemukakan oleh golongan Neo-keynesian seperti James Tobin. Tobin mengata-

kan bahwa sekali terjadi inflasi, akan timbul kecenderungan bagi tingkat harga akan terus meningkat karena kekuatan inersianya, inflasi macam ini akan dapat berhenti atau berkurang bila keadaan ekonomi mulai melemah dan mengarah pada keadaan resesi di mana terjadi kelesuan harga.

Grafik 2.4

Demand-Supply Inflation



3.2.3 Pandangan Golongan Moneteris dan Golongan Strukturalis

Golongan moneteris berpendapat bahwa inflasi sepenuhnya merupakan gejala moneter dan kontrolnya adalah melalui pengawasan atas jumlah uang beredar, supaya laju pertumbuhannya selalu konsisten dengan laju pertumbuhan jumlah uang yang diminta atau dibutuhkan masyarakat. Sedangkan golongan strukturalis berpendapat bahwa adanya ciri-ciri struktural tertentu di dalam perekonomian negara berkembang dalam bentuk bottleneck struktural, yang menyebabkan terjadinya inflasi. Cara mengatasi timbulnya inflasi adalah dengan menghilangkan bottleneck struktural tersebut.

Para ahli ekonomi tentang inflasi di Amerika Latin yang tergabung dalam golongan moneteris berpendapat bahwa inflasi timbul dan disebabkan oleh kebijaksanaan moneter dan fiskal yang ekspansif, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat sangat berlebih. Terjadinya kelebihan jumlah uang beredar di masyarakat ini akan menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan barang dan jasa di sektor riil. Ekspansif di dalam sektor moneter maupun fiskal akan menyebabkan terjadinya peningkatan aggregate demand, sehingga pada keadaan output full-employment akan mengakibatkan excess demand yang mendorong pening-

katan harga. Inflasi, menurut golongan monetaris, dapat diturunkan dengan cara menahan atau menghilangkan excess demand melalui kebijaksanaan moneter dan kebijaksanaan fiskal yang bersifat kontraktif, atau melalui kontrol terhadap peningkatan upah serta penghapusan subsidi atas nilai tukar valuta asing dengan bentuk bantuan keuangan internasional.

Pendapat golongan monetaris mengenai cara menanggulangi inflasi tak hanya berdasarkan pada kebijaksanaan moneter saja, yaitu memakai peralatan moneter tradisional, melainkan juga menggunakan kebijaksanaan fiskal, nampaknya dilakukan mengingat keadaan pasar uang dan modal di negara berkembang masih terbelakang sehingga kurang bisa diharapkan efektivitas program stabilisasi perekonomian negara-negara berkembang, yang disponsori oleh International Monetary Fund (IMF).

Golongan strukturalis, di lain pihak, berpendapat bahwa inflasi di negara berkembang tak dapat dielakkan bagi negara yang hendak mengejar pertumbuhan ekonomi yang pesat, padahal perekonomiannya terdapat bottleneck atau kekakuan struktural. Oleh karena itu, analisis golongan strukturalis lebih banyak tertuju pada hambatan-hambatan struktural yang menimbulkan inflasi, seperti yang dikemukakan oleh Osvaldo Sunkel, yaitu tidak elastisnya penawaran

bahan makanan, bottleneck dalam penerimaan devisa dan hambatan finansial.⁶

Mengenai hambatan struktural yang pertama, yaitu tidak elastisnya penawaran bahan makanan, disebabkan oleh cukup besarnya peran faktor musim atau cuaca, disamping masih tradisionalnya proses produksi bahan makanan serta rendahnya produktivitas petani dan tanah. W. Baer⁷ menambahkan adanya faktor urbanisasi yang cepat, yang di satu pihak menyebabkan tenaga penghasil bahan makanan berkurang, dan di lain pihak, dengan meningkatnya pendapatan mereka, akan menyebabkan meningkat cepatnya permintaan akan bahan makanan, padahal penawaran tak dapat mencukupi (inelastis). Roberto de Oliviera Compos menuding pada terlalu banyaknya dan terlalu seringnya pengaturan administratif terhadap harga bahan makanan oleh pemerintah, yang dimaksudkan untuk menolong konsumen dari tekanan kenaikan harga dan juga untuk menghindarkan kenaikan upah. Padahal pengaturan harga tersebut justru merupakan "disinsentif" bagi para produsen bahan makanan untuk

6. O. Sunkel, *Inflation in Chile : An Orthodox Approach*, *International Economic Papers*, no. 10, 1960 seperti dikutip dari Anton Hermanto Gunawan, *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*, PAU-Ekonomi-UI, Jakarta, 1991, hlm. 26

7. W. Baer, *The Inflation Controversy in Latin America : A Survey*, *Latin American Research Review*, Spring, 1967 seperti dikutip dari Anton Hermanto Gunawan, *loc.cit.*,

meningkatkan outputnya.⁸ Bulmer Thomas menanggapi pendapat ini dengan mengatakan, bila penawaran bahan makanan inelastis, dapat dilakukan cara untuk menutupi kekurangan bahan makanan dengan mengimpornya dari luar negeri guna mencegah tekanan kelebihan permintaan terhadap harga.⁹

Tetapi perlu diingat bahwa, sebagaimana layaknya negara berkembang dihadapkan pada masalah lain yang membatasi impor, yaitu ketiadaan atau kekurangan devisa untuk mengimpor barang dari luar negeri ; ada bottleneck dalam penerimaan devisa.

Mengenai bottleneck dalam penerimaan devisa, H. Chenery dan A. Strout mengatakan bahwa bottleneck itu timbul akibat meningkat pesatnya permintaan impor yang tercermin dalam program pembangunan berencana, mobilitas faktor produksi yang tak sempurna, dan tidak cukup cepatnya peningkatan penerimaan devisa, sehingga mendorong kecenderungan

8. R.de.O. Campos (1961), Two Views on Inflation in Latin America, dalam A.O. Hirschman (ed.), Latin American Issues : Essays and Comments, The Twentieth Century Fund, 1961, hlm. 112

9. V. Bulmer Thomas, A Model of Inflation in Central America, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 39 (4), 1977

terjadinya defisit dalam neraca perdagangan.¹⁰ Foreign exchange constraint ini, di lain pihak, menyebabkan kecenderungan bagi pemerintah negara berkembang untuk menganut kebijaksanaan pengaturan impor yang ketat, sehingga menyebabkan timbulnya shortages barang-barang yang tadinya diimpor; berarti harga relatif barang-barang impor tersebut naik dan akan menimbulkan terjadinya inflasi. Guna mengatasi shortages tersebut, biasanya pemerintah negara berkembang cenderung menganut kebijaksanaan substitusi impor, terutama pada industri hilir, disertai dengan kebijaksanaan proteksi yang ketat, sehingga industri yang muncul adalah industri yang kurang efisien. Akibatnya, harga barang-barang industri naik, yang disertai dengan peningkatan pendapatan sektor non-pertanian, sehingga lebih banyak lagi permintaan akan output pertanian (bahan makanan) dengan kondisi penawarannya yang inelastis, dan pada akhirnya akan timbul inflasi. W. Baer menambahkan bahwa kesulitan neraca pembayaran yang permanen, cepat atau lambat akan mendorong negara yang bersangkutan melakukan devaluasi mata uangnya,

10. H. Chenery dan A. Strout, Foreign Assistance and Economic Development, American Economic Review, September 1966 seperti dikutip dari Anton Hermanto Gunawan, op.cit., hlm. 27

sehingga harga-harga cenderung sering naik, lalu terjadi inflasi.

Masalah struktural lainnya adalah kurangnya sumber-sumber keuangan dalam negeri. Urbanisasi yang cepat, seiring dengan usaha industrialisasi yang terpusat di kota-kota, menyebabkan diperlukannya fasilitas prasarana fisik dan sosial ; padahal pemerintah di negara berkembang sukar meningkatkan penerimaannya dengan cepat guna membiayai pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut. Vitò Tanzi mengatakan, bahwa hal yang menyebabkan hambatan di dalam anggaran pemerintah adalah rendahnya inflation elasticity dari penerimaan pajak dan adanya tenggang waktu pengumpulan yang terlalu lama. Inflation elasticity penerimaan pajak yang rendah itu mengakibatkan bila ada kenaikan harga/inflasi, nilai pajak riil akan turun. Ini karena pajak sering ditetapkan dalam nilai uang yang besarnya tetap.¹¹

D. Dutton serta B.B. Aghevli dan M.S. Khan mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah dalam nilai riil cenderung tetap besarnya, sehingga bila tingkat harga naik, nilai nominal pengeluaran akan naik secara proporsional. Dengan penerimaan pajak nominal

11. V. Tanzy, Inflation, Lags in Collection and the Real Value of Tax Revenue, IMF Staff Papers, vol. 24 (1), 1977

yang cenderung tetap, kecenderungan naiknya pengeluaran tersebut akan menyebabkan timbulnya defisit anggaran pemerintah.¹² Kesulitan keuangan di sektor pemerintah ini tak dapat ditunjang oleh keadaan di sektor swasta, karena tingkat pemupukan modal yang rendah ; lebih banyak dana idle di sektor swasta lari ke investasi pada barang yang tak produktif, misalnya emas, tanah, bahkan dilakukan hoarding. Oleh karena itu, mau tak mau pemerintah harus berperan lebih besar, dan jika hendak mempertahankan pengeluarannya guna menjaga momentum pembangunan, biasanya ditempuh cara deficit financing dengan cara menarik pinjaman dari sistem perbankan, menarik pinjaman dari masyarakat, atau yang lebih parah adalah mencetak uang. Akibatnya, akan timbul ekspansi moneter sehingga mendorong tingkat harga untuk naik lebih cepat. Nampak dalam hal ini bahwa golongan strukturalis tak menolak adanya variabel moneter, jumlah uang beredar sebagai sebagian penentu inflasi yang cepat ; dalam arti bahwa inflasi tak akan dapat terus meningkat dengan cepat tanpa disertai oleh ekspansi moneter. Penekanannya adalah pada kekuatan-kekuatan yang menyebabkan otoritas moneter

12. D. Dutton, A. Model of Self-Generating Inflation : The Argentina Case, *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 3 (2), 1971

tak dapat menghindarkan peningkatan jumlah uang beredar (ekspansi moneter). Ditambahkan, bahwa walaupun permintaan total turun akibat kebijaksanaan monetary restraint, tekanan inflasi struktural tetap ada dan program stabilisasi jangka pendek akan merugikan pertumbuhan ekonomi, karena justru akan mencegah realisasi perubahan struktural yang diperlukan untuk meniadakan inflasi.¹³

Pendapat kedua golongan yang bertentangan mengenai sumber inflasi dapat disimpulkan berikut ini. Golongan monetaris berpendapat bahwa inflasi dapat memberikan suasana yang tak sehat lagi pembangunan ekonomi, bahkan menjadi penghambat yang nyata sehingga guna mencapai pembangunan ekonomi yang berhasil, maka inflasi harus terlebih dulu dilenyapkan. Ekspansi moneter yang menyebabkan terjadinya inflasi harus diatasi melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter yang ketat, sehingga terjadi kontraksi moneter, yang berarti terjadinya pengurangan excess demand. Dan kebijaksanaan fiskal serta moneter yang tepat justru akan dapat mengurangi ketegangan struktural yang ada. Di pihak lain, golongan strukturalis berpendapat bahwa inflasi itu

13. J. Grunwald (1981), *The Structuralist School on Price Stabilization and Economic Development : The Chilean Case*, dalam A. O. Hirschman, loc.cit.

inheren dengan pembangunan, dan bahwa memang diperlukan upaya untuk meniadakan inflasi. Akan tetapi, kalau usaha stabilisasi tersebut justru menyebabkan terhambatnya pembangunan (kontraksi ekonomi), maka mereka lebih setuju tetap membiarkan terjadinya inflasi. Jadi, bukan ekspansi moneter yang merupakan penyebab utama inflasi, melainkan ketegangan struktural dalam masyarakat. Ekspansi moneter memang mendukung lebih cepatnya laju inflasi, tetapi ekspansi moneter itu "dihasilkan" (induced) oleh struktur perekonomian yang ada. Dikatakan lebih lanjut, bahwa program stabilisasi moneter tak akan menghilangkan inflasi, tetapi justru menyebabkan terjadinya stagnasi dalam pembangunan, sehingga untuk mengatasi inflasi justru perlu pembangunan ekonomi yang akan mengubah struktur.¹⁴

Kritik golongan monetaris terhadap pendapat golongan strukturalis ini adalah, bahwa ketegangan struktural bukan penyebab inflasi, melainkan sebagai akibat dari adanya inflasi. Hambatan struktural di bidang penerimaan devisa mencerminkan kegagalan untuk menyesuaikan kurs mata uang asing guna mengkompensasikan inflasi sehingga menyebabkan turunnya

14. A. Wardhana, *Inflasi dan Ketegangan-ketegangan Struktural*, hands-out course PPN, FEUI, Mei 1975

ekspor. Sementara itu, adanya bottleneck dalam penawaran dalam makanan merupakan akibat dari kebijaksanaan harga dan kebijaksanaan impor yang ditujukan untuk menekan harga bahan makanan yang naik terus akibat inflasi.

Nampaknya, silang pendapat antara kedua golongan ini cukup rumit dan makin sukar dicari ujung pangkalnya. Akan tetapi, yang pasti bisa disimpulkan bahwa golongan monetaris dalam jangka panjang akan menyetujui pentingnya perubahan struktural dalam perekonomian bagi pembangunan ekonomi, sedangkan golongan strukturalis dapat menerima dilaksanakannya kebijaksanaan fiskal dan moneter dalam jangka pendek guna menekan inflasi, selama tidak terlalu mengganggu pencapaian pembangunan.

2.3. Studi Untuk Indonesia

2.3.1. Studi Anwar Nasution

Prinsip anggaran berimbang telah mulai dijabarkan oleh Indonesia pada tahun 1968 dan terus dipegang teguh sampai dengan sekarang ini. Yang disebut dengan anggaran berimbang dalam RAPBN adalah bahwa defisit anggaran negara ditutup dengan nilai lawan pinjaman dan bantuan luar negeri, yang dalam anggaran digolongkan sebagai penerimaan pembangunan.

Menurut Anwar Nasution, anggaran belanja berimbang sangat ampuh sebagai alat kebijaksanaan pengendalian inflasi jika defisit anggaran ditutup dengan penambahan stok jumlah uang beredar. Namun, setelah bertambah besarnya proporsi penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman dan bantuan luar negeri serta pajak perseroan minyak, anggaran negara yang berimbang tersebut telah berubah menjadi sumber utama penyebab pertambahan jumlah uang beredar dan inflasi.

Pengaruh moneter anggaran berimbang menjadi lebih jelas jika penerimaan dan pengeluaran anggaran negara dikelompokkan berdasarkan pengaruh langsungnya pada perekonomian dalam atau luar negeri. Berdasarkan pengelompokkan ini maka anggaran dapat dibagi menjadi anggaran (yang berorientasi pada ekonomi) dalam negeri dan anggaran (yang berorientasi pada ekonomi) luar negeri. Penerimaan yang berorientasi pada ekonomi luar negeri (RF) merupakan penerimaan yang berasal dari daya beli masyarakat asing. Penerimaan seperti ini biasanya diterima dalam bentuk mata uang asing pula. Dalam kelompok penerimaan ini termasuk bantuan dan pinjaman luar negeri, pajak perseroan minyak yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia, sebagian dari pajak ekspor

serta pajak atas badan dan orang asing. Pengeluaran anggaran yang berorientasi pada ekonomi luar negeri (GF), tidak merupakan bagian dari permintaan agregat di dalam negeri kita. Pengeluaran anggaran luar negeri mengurangi permintaan agregat di dalam negeri. Sebagian dari padanya (seperti impor) menambah persediaan barang dan jasa atau penawaran agregat di dalam negeri.

Penerimaan yang berorientasi pada ekonomi dalam negeri (RD) mengurangi daya beli atau permintaan agregat masyarakat di dalam negeri. Penerimaan ini biasanya diterima dalam bentuk rupiah. Pengeluaran negara yang berorientasi pada ekonomi dalam negeri (GD) merupakan bagian dari permintaan agregat masyarakat di dalam negeri.

Dalam studinya ini Anwar Nasution mengkhususkan peninjauannya pada RAPBN 1984/85. Berdasarkan konsep anggaran di atas, ia mengasumsikan bahwa penerimaan luar negeri (RF) terdiri dari (a) Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam serta (b) Penerimaan Pembangunan. Pengeluaran luar negeri (GF) diasumsikan sebagai penjumlahan dari (a) belanja pegawai dan barang di luar negeri ; (b) bantuan proyek dan (c) kira-kira 40 % dari belanja barang di dalam negeri dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan rupiah. Jumlah penerimaan dalam negeri (RD)

merupakan jumlah seluruh penerimaan dikurangi dengan RF, sedangkan pengeluaran dalam negeri (GD) merupakan jumlah seluruh pengeluarannya dikurang dengan GF.

Perhitungan kasar di atas menunjukkan bahwa struktur RAPBN 1984/85 tidak berbeda dengan struktur APBN pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana dengan APBN tahun-tahun yang lalu, defisit komponen anggaran dalam negeri (dalam rupiah) RAPBN 1984/85, akan dibelanjai dengan surplus pada komponen anggaran luar negerinya (dalam mata uang asing), penukaran seperti ini akan menambah stok jumlah uang beredar (melalui penambahan uang primer), jika devisa tadi dibeli langsung oleh Bank Indonesia dan bank-bank komersial dengan menciptakan uang giral. Dalam proses ini stok persediaan atau cadangan devisa perbankan meningkat sejalan dengan peningkatan stok uang beredar tersebut. Jika devisa yang sama dibeli oleh masyarakat nonbank, jumlah uang beredar tidak akan berubah karena yang terjadi hanyalah transfer kepemilikan rupiah dari masyarakat pada pemerintah dalam proses jual beli devisa.

Dulu, hampir seluruh devisa dari surplus anggaran luar negeri pemerintah dibeli oleh Bank Indonesia. Akibatnya terjadilah monetisasi surplus anggaran luar negeri, yang menjadi penyebab utama

pertambahan stok uang beredar yang sangat cepat. Di pihak lain, proses pembangunan memang mendorong kenaikan permintaan akan uang akibat dari semakin berkembangnya spesialisasi kegiatan ekonomi masyarakat, penurunan peranan produksi subsistensi dalam pembentukan pendapatan nasional, perubahan struktur perkonomian dan urbanisasi. Tetapi peningkatan permintaan akan uang akibat dari perubahan struktur ekonomi dan sosial seperti ini berlangsung sangat lambat dan tidak dapat mengejar laju pertumbuhan stok jumlah uang beredar.

Sementara itu, laju pertumbuhan produksi nasional (dalam arti riil) juga tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan stok uang beredar di atas. Karenanya maka peningkatan stok jumlah uang beredar yang sangat cepat itu telah menimbulkan inflasi.

Adanya monetisasi devisa yang bersumber dari surplus komponen anggaran luar negeri pemerintah di atas, telah mempersukar Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas pokoknya guna mengendalikan kestabilan rupiah baik di dalam negeri (inflasi) maupun terhadap mata uang asing.

2.3.2. Studi Anton Hermanto Gunawan

Menurut Anton H.G dalam studinya tentang defisit anggaran pemerintah periode observasi 1969 -

1982, penggunaan istilah anggaran berimbang (balanced budget) lebih ditujukan untuk konsumsi politik. Sebenarnya, konsep yang mendasari anggaran pemerintah adalah konsep nilai netto, yaitu konsep anggaran pemerintah yang menunjukkan saldo rekening lancar APBN sebagai tabungan pemerintah guna membiayai pengeluaran pembangunan. Dalam kenyataannya, besarnya tabungan pemerintah selalu lebih kecil daripada pengeluaran pembangunan; berarti terjadi defisit anggaran pemerintah, yang selama ini di biayai dengan nilai lawan dari bantuan/pinjaman luar negeri. Konsep anggaran ini tidak dapat menjelaskan pengaruh ekonomis anggaran belanja terhadap permintaan agregat. Oleh karena itu, dalam studinya digunakan konsep defisit domestik anggaran pemerintah, yang memisahkan penerimaan maupun pengeluaran pemerintah menurut orientasinya pada perekonomian domestik atau luar negeri. Ini mengingat cukup besarnya pengaruh penerimaan dan pengeluaran yang berorientasi pada perekonomian luar negeri di dalam anggaran pemerintah.

Secara ringkas, perhitungan defisit domestik anggaran pemerintah selama periode penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan luar negeri = PPs minyak + penerimaan pembangunan.

- b. Penerimaan domestik = penerimaan total - penerimaan luar negeri.
- c. Pengeluaran luar negeri (1969-1973) = belanja pegawai luar negeri + 8,5 % dari belanja barang dalam negeri + belanja barang luar negeri + cicilan utang dan bunga luar negeri + 8,5 % dari pengeluaran rutin lain-lain + 38,5 % dari pengeluaran pembangunan di luar bantuan proyek + pengeluaran pembangunan bantuan proyek.
- d. Pengeluaran luar negeri (1974-1978) = belanja pegawai luar negeri + 12,2 % dari belanja barang dalam negeri + belanja barang luar negeri + cicilan utang dan bunga luar negeri + 12,2 % dari pengeluaran rutin lain-lain + 36,1 % dari pengeluaran pembangunan di luar bantuan proyek + pengeluaran pembangunan bantuan proyek.
- e. Pengeluaran luar negeri (1979-1982) = belanja pegawai luar negeri + 9,9 % dari belanja barang dalam negeri + belanja barang luar negeri + cicilan utang dan bunga luar negeri + 9,9 % dari pengeluaran rutin lain-lain + 24,6 % dari pengeluaran pembangunan di luar bantuan proyek + pengeluaran pembangunan bantuan proyek.
- f. Pengeluaran domestik = pengeluaran total - pengeluaran luar negeri.
- g. Defisit domestik = pengeluaran domestik - penerimaan domestik.

Perkembangan komponen luar negeri dari pengeluaran konsumsi pemerintah (Government Consumption Expenditure) menunjukkan peningkatan dari 8,5 % menjadi 12,2 % pada tahun 1974-1978 dan menurun kembali pada periode 1979-1982 menjadi 9,9 %. Ini memberikan gambaran situasi perekonomian periode 1974-1978 yang memperoleh windfall income dari minyak dan dibelanjakan untuk konsumsi. Sementara itu, komponen luar negeri yang terkandung dalam pengeluaran pembangunan nonbantuan proyek menunjukkan penurunan dari 38,5 % pada periode 1969-1973 menjadi 36,1 % dan 24,6 % pada periode 1974-1978 dan periode 1979-1982.

Perkembangan defisit domestik anggaran pemerintah selama periode 1969-1982 ternyata sangat pesat sekali, dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 48,9 % (dari Rp 34 milyar menjadi Rp 6 triliun); di mana laju pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Peningkatan yang sangat pesat ini terutama bersumber pada sangat lemahnya komponen domestik dalam penerimaan pemerintah disertai oleh peningkatan pengeluaran domestik yang cepat, sementara sumber-sumber luar negerinya meningkat cukup cepat. Peningkatan defisit domestik anggaran pemerintah inilah yang paling mempengaruhi naiknya tingkat harga umum (53,6 % menurut hasil regresi dan 59 % menurut perhitungan Beta coefficient).

BAB III

METODOLOGI

3.1 Landasan Teoritik

3.1.1 Kerangka Konseptual

Ada dua macam pendekatan yang dapat dilakukan untuk membentuk dan menerangkan kerangka penentuan tingkat harga domestik, yaitu pendekatan dengan model lengkap (complete model approach) atau pendekatan yang menggunakan satu persamaan bentuk singkat (a single reduced-form approach).¹

Pendekatan model lengkap yang menggambarkan suatu sistem persamaan simultan dalam menerangkan hubungan struktural perekonomian, secara teoritis sangat tepat digunakan. Akan tetapi, biasanya karena hambatan data dan lain hal, sering menyebabkan kekurang-sesuaian hasil analisis.

Oleh karena itu, guna menerangkan faktor penentu tingkat harga domestik digunakan pendekatan kedua yang menerangkan hubungan antara tingkat harga umum domestik dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya dalam satu persamaan saja.

Empat faktor yang dimasukkan ke dalam persamaan tingkat harga umum adalah defisit domestik anggaran

1. J. Supranto, *Ekonometrik Buku Dua*, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

pemerintah, produksi minyak bumi, tingkat harga internasional dan produksi bahan makanan di dalam negeri. Keempat faktor yang saling terkait ini, serta adanya pengaruh kebijaksanaan nilai tukar valuta asing dan pengendalian harga di dalam negeri, baik secara langsung maupun tak langsung akan mempengaruhi tingkat harga umum. Jumlah uang primer dan uang beredar memegang peran penting dalam menyalurkan pengaruh keempat faktor utama itu pada kenaikan tingkat harga umum.

Defisit domestik anggaran pemerintah terjadi karena penerimaan domestik jauh lebih kecil daripada pengeluaran domestik, atau bisa juga diartikan bahwa penerimaan luar negeri jauh lebih besar daripada pengeluaran luar negerinya (dengan asumsi anggaran berimbang). Penerimaan luar negeri yang besar itu terutama berasal dari dana bantuan/pinjaman luar negeri dan minyak bumi. Guna melaksanakan pembangunan, pemerintah masih harus mengimpor barang modal dan bahan baku dari luar negeri, sehingga pengeluaran luar negeri cukup tinggi. Juga untuk mengendalikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta harga bahan makanan pokok di dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat, baik melalui impor barang kebutuhan tersebut guna memenuhi permintaan dalam negeri, penekanan harga,

maupun pemberian insentif bagi produsen bahan makanan (petani).

Pengendalian harga BBM dalam negeri dapat pula secara langsung mempengaruhi tingkat harga umum dan inflasi, akibat dari dikurangnya subsidi BBM oleh pemerintah. Sementara itu, pengendalian harga bahan makanan terus dilakukan secara ketat oleh pemerintah, melalui pengaturan penawaran bahan makanan oleh BULOG dan penerapan tingkat harga beli gabah kering dari petani.

Pengendalian harga bahan makanan melalui BULOG dapat mempengaruhi besarnya uang primer melalui pinjaman bank sentral pada lembaga tersebut. Tingkat harga dunia dan perkembangan nilai tukar valuta asing mempengaruhi tingkat harga umum di dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung melalui efeknya terhadap neraca pembayaran. Perubahan neraca pembayaran akan mempengaruhi besarnya uang primer dan jumlah uang beredar, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan tingkat harga umum.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Hipotesis

Dalam keadaan *ceteris paribus*, diduga variabel-variabel independen akan menghasilkan koefisien yang mempunyai tanda :

- Positif untuk variabel defisit domestik anggaran pemerintah, yang berarti semakin besar defisit domestik anggaran pemerintah akan meningkatkan tingkat harga umum domestik.
- Positif untuk tingkat harga internasional, yang berarti naiknya tingkat harga internasional akan menyebabkan naiknya tingkat harga umum domestik.
- Negatif untuk indeks fluktuasi produksi bahan makanan, yang berarti adanya peningkatan indeks fluktuasi, yang mencerminkan kelebihan produksi bahan makanan, akan menyebabkan turunnya tingkat harga umum domestik.
- Positif untuk indeks fluktuasi produksi minyak dan gas bumi, yang berarti semakin besar indeks fluktuasi, yang mencerminkan meningkatnya nilai produksi minyak bumi, akan menyebabkan membesarnya penerimaan minyak sehingga cenderung membuat terjadinya ekspansi jumlah uang beredar sehingga tingkat harga umum domestik juga akan meningkat.

3.2.2 Model Analisis

3.2.2.1. Model Ekonometri

Dalam penulisan ini digunakan analisa kuantitatif, di mana akan dianalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga umum secara kuantitatif. Olarn Chaipravat, Kanitta Meesook

dan Siri Ganjarerndee² menjelaskan tentang model inflasi yang digunakan untuk Indonesia dalam sebuah model ekonometri. Ada tiga faktor utama penyebab inflasi di Indonesia yang dimasukkan ke dalam model yaitu tingkat harga internasional, defisit domestik anggaran pemerintah dan secara bergantian produksi bahan makanan dan produksi minyak bumi. Modelnya adalah sebagai berikut :

$$P_t = a + b IHI_t + c DDAP_t + d ITBM_{t-1} + e_t \dots (1)$$

atau

$$P_t = a + b IHI_t + c DDAP_t + d IPP_{t-1} + e_t \dots (2)$$

di mana :

P_t = tingkat harga umum domestik.

IHI_t = indeks harga dunia yang diukur menurut satuan mata uang dalam negeri (rupiah).

$DDAP_t$ = defisit domestik anggaran pemerintah.

$ITBM_{t-1}$ = indeks fluktuasi nilai tambah produksi bahan makanan tahun sebelumnya.

IPP_{t-1} = indeks fluktuasi nilai tambah produksi minyak bumi tahun sebelumnya.

e_t = gangguan acak (disturbance terms)

Kedua persamaan itu secara teknis akan diuji secara ekonometri terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis ekonominya.

2. O. Chaiparvat, et. al, Main Sources of Inflation in Developing ESCAP Countries, economic Bulletin for Asia and the Pacific, vol. XXIX, no. 1, 1978.

3.2.2.2. Bentuk - Bentuk Pengujian

Hasil regresi OLS (Ordinary Least Square) akan diuji apakah memenuhi kriteria ekonometri. Dalam hal ini digunakan :

- Uji t, digunakan untuk menguji hubungan variabel bebas secara individu terhadap variabel terikatnya. Variabel ini dikatakan signifikan bila t hitung lebih besar atau sama dengan t tabel dan sebaliknya.
- Uji F, digunakan untuk menguji kebenaran hubungan antara seluruh variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel terikatnya. Dikatakan signifikan bila F hitung lebih besar dari F tabel dan sebaliknya.
- Uji R^2 , digunakan untuk mengetahui berapa jauh eratny hubungan antara variabel babas dan terikat.

3.2.2.3. Metode Penarikan Kesimpulan

Hasil regresi OLS tersebut, belum dapat secara langsung menunjukkan peran masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Oleh karena itu, ditempuh dengan melakukan dekomposisi perubahan tingkat harga umum sesuai dengan kontribusi relatif sumber-sumber utamanya. Dari persamaan (1) diperoleh :

$$P_t = a + b (HI_t \cdot IKR_t) + c DDAP_t + d ITBM_{t-1} + e_t$$

atau

$$P_t = a + b (HI_t \cdot IKR_t) + c DDAP_t + d IPP_{t-1} + e_t$$

dimana

$$IHI_t = HI_t \cdot IKR_t$$

HI_t = Indeks harga Internasional (dalam US\$)
dengan tahun dasar 1977/78.

IKR_t = Indeks perkembangan nilai tukar rupiah
terhadap US\$ dengan tahun dasar 1977/78.

maka

$$P_t = b (\Delta HI_t) (IKR_t) + b (\Delta IKR_t) (HI_t) + c (\Delta DDAP_t) + d (\Delta ITBM_{t-1}) + e_t$$

atau

$$P_t = b (\Delta HI_t) (IKR_t) + b (\Delta IKR_t) (HI_t) + c (\Delta DDAP_t) + d (\Delta IPP_{t-1}) + e_t$$

Dari hasil ini diharapkan dapat diperoleh kesimpulan tentang peran masing-masing variabel bebas dalam menerangkan perkembangan tingkat harga umum dan inflasi.

3.2.3 Pembatasan Variabel-variabel dan Sumber Data

3.2.3.1 Tingkat Harga Umum Domestik (P_t)

Tingkat harga domestik dicerminkan oleh indeks Biaya Hidup atau Indeks Harga Konsumen Indonesia. Data indeks harga diperoleh dari Biro Pusat Statistik, "Indikator Ekonomi", beberapa penerbitan.

3.2.3.2 Defisit Domestik Anggaran Pemerintah ($DDAP_t$)

Data ini merupakan data taksiran yang dihitung dengan beberapa asumsi tertentu mengingat data yang sebenarnya tidak ada. Asumsi penting yang digunakan dalam penghitungan data ini adalah sewaktu melakukan pemisahan komponen anggaran dalam komponen domestik dan luar negeri. Penghitungan defisit domestik anggaran pemerintah ini didasarkan atas tahun anggaran. Data anggaran diperoleh dari Departemen Keuangan RI, untuk kemudian diolah dengan beberapa asumsi dengan dasar data dari Tabel Input-Output terbitan Biro Pusat Statistik.

3.2.3.3 Tingkat Harga Internasional (IHI_t)

Sebagai IHI_t , digunakan data indeks harga internasional menurut Bank Dunia. Data ini diambil dari publikasi The World Bank, "Half-Yearly Revision of Commodity Price Forecasts and Quarterly Review of Commodity Markets". Karena data indeks harga internasional ini dihitung bukan atas dasar nilai mata uang dalam negeri (rupiah), maka dilakukan penyesuaian dengan cara mengalikannya dengan indeks perkembangan kurs dollar Amerika terhadap rupiah. Data nilai tukar (kurs) merupakan nilai rata-rata dalam masing-masing tahun yang diambil

dari publikasi Bank Indonesia, Laporan Mingguan, beberapa penerbitan.

3.2.3.4 Fluktuasi Nilai Tambah Bahan Makanan ($ITBM_t$)

Fluktuasi nilai tambah ini dihitung berdasarkan rasio nilai tambah produksi bahan makanan terhadap trend normal jangka panjangnya. Nilai tambah produksi bahan makanan yang digunakan diperoleh dari nilai tambah bruto subsektor tanaman bahan makanan. Digunakan tenggang waktu satu tahun, mengingat bahwa produksi bahan makanan tahun lalu baru akan dikonsumsi pada tahun ini, atau dampak ekonomi dari produksi bahan makanan baru terlihat atau terasa pada tahun berikutnya. Sumber data $ITBM_t$ ini adalah publikasi Departemen Keuangan, "Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara".

3.2.3.5 Fluktuasi Nilai Tambah Minyak Bumi (IPP_t)

Fluktuasi nilai tambah ini dihitung berdasarkan rasio nilai tambah produksi minyak bumi terhadap trend normal jangka panjangnya. Sebagai produksi dari nilai tambah produksi minyak bumi, digunakan data nilai tambah bruto sektor pertambangan dan penggalan, di mana subsektor minyak bumi memegang peran penting. Digunakan tenggang waktu satu tahun mengingat bahwa produksi minyak

bumi diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi setelah satu tahun berikutnya. Sumber data IPP_t ini adalah publikasi Departemen Keuangan, "Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara".

BAB IV

INFLASI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI INDONESIA

4.1 Indikator Inflasi dan Perkembangannya

4.1.1 Indikator Inflasi

Untuk mengamati stabil atau tidaknya harga barang, diperlukan tolok ukur yang menunjukkan perubahan harga barang. Seperti umumnya negara-negara di dunia, Indonesia pun menggunakan IHK (Indeks Harga Konsumen / Consumer Price Index [CPI]) sejak bulan April 1979, setelah sebelumnya menggunakan IBH (Indeks Biaya Hidup / Cost of Living Index [CLI]).

Indeks Biaya Hidup dihitung berdasarkan pengamatan perkembangan harga 62 macam barang dan jasa di Jakarta dengan suatu timbangan (weight) yang telah ditetapkan berdasarkan hasil survei Anggaran Rumah Tangga di kalangan "buruh rendahan" (buruh pabrik) pada tahun 1957-1958 selama satu tahun (4 kali survei dalam 3 bulan). Pada mulanya digunakan tahun dasar 1957/58 dan karena berkecamuknya inflasi/hiperinflasi pada tahun 1960 - 1961, maka pada bulan September 1966 dilakukan "pergeseran tahun dasar" secara sederhana dengan tahun 1966 sebagai tahun dasar.

Sedangkan IHK yang dimaksud disini adalah IHK hasil Survey Biaya Hidup periode 1977-1978, yang mencakup 17 Ibukota provinsi (Medan, Padang, Palembang, DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Ujung Pandang, Ambon dan Jayapura), dengan komoditi berkisar 115 - 150 jenis barang dan jasa yang mewakili kelompok sandang, pangan, perumahan serta aneka barang dan jasa.

Harga yang dipakai adalah harga eceran di daerah kota, dengan menggunakan metode laspeyres yang telah dimodifikasi. Selanjutnya IHK Nasional dihitung berdasarkan IHK 17 ibukota propinsi dengan menggunakan persentase banyaknya rumah tangga pada masing-masing propinsi sebagai timbangan. Sedangkan IHK tahunan merupakan penjumlahan angka-angka IHK setiap bulannya.

4.1.2 Perkembangan Inflasi

Dengan menggunakan besarnya perubahan tahunan dari IBH/IHK, dapat dilihat gejala besaran laju inflasi Indonesia pada Tabel 4.2.

Rata-rata laju inflasi tahunan adalah sebesar 12,18%, sedangkan gejala perkembangannya (kv) 0,42. Gejala perubahan tahunan inflasi tersebut secara grafis diperlihatkan dalam grafik 4.1.

Laju inflasi pada tahun 1974/75 mencapai angka 20,10 % setahun. Anwar Nasution mengatakan bahwa penyebab inflasi yang tinggi itu terutam ada tiga macam, yaitu terjadi masa paceklik bahan makanan akibat musim kemarau panjang yang disertai oleh peningkatan harga bahan ekspor bukan minyak pada tahun 1972, meningkatnya pemasukan modal/pinjaman swasta dari luar negeri dan berlipat gandanya penerimaan minyak akibat peningkatan harga minyak di pasaran dunia. Guna mengatasi laju inflasi yang demikian tinggi, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan anti-inflasi dalam bentuk Paket Anti-Inflasi 9 April 1974 yang menyangkut segi pengelolaan permintaan dan penawaran. Di bidang pengelolaan permintaan, dilakukan beberapa kebijaksanaan perkreditan dalam negeri, kebijaksanaan dana, kebijaksanaan pemasukan modal dan kebijaksanaan anggaran belanja. Sedangkan dari segi penawaran dilakukan program cadangan nasional, kebijaksanaan perdagangan dalam negeri dan program pengadaan pangan. Akibat dari adanya paket kebijaksanaan itu, laju inflasi tahunan Indonesia cukup cepat pada beberapa tahun berikutnya.

Setelah tahun 1978, akibat diadakannya kebijaksanaan moneter 15 November 1978 (KNOP 15) berupa devaluasi mata uang rupiah terhadap dollar Amerika

dari Rp 415 / US\$ 1 menjadi Rp 625 / US\$ 1, terjadi lagi lonjakan inflasi hingga mencapai laju 19,49 %. Maksud diadakannya KNOP 15 adalah untuk meningkatkan ekspor dan menurunkan impor, serta demi tercapainya keairahan produksi dalam negeri. Akan tetapi peningkatan harga barang-barang impor akibat devaluasi tersebut mempengaruhi pula harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari. Untuk mengatasi gejolak harga yang cukup besar itu, diantaranya melalui pengendalian harga kebutuhan pokok (terutama beras) oleh BULOG. Tahun berikutnya, terlihat penurunan laju inflasi sebagai akibat dari langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah maupun pengaruh resesi dunia.

Laju inflasi terlihat mengalami kenaikan pada tahun 1983/84 dan 1986/87, ini terutama disebabkan oleh adanya cost-push inflation akibat devaluasi rupiah pada bulan Maret 1983 dan bulan September 1986. Selain disebabkan oleh adanya devaluasi, tingginya angka inflasi tahun 1983/84 juga disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) domestik pada awal tahun 1983. Kenaikan harga BBM domestik masih dilakukan dua kali sejak saat itu, yaitu pada awal tahun 1984 dan bulan April 1985.

Tabel 4.1
Indeks Biaya Hidup/Indeks Harga Konsumen Indonesia
1974/75 - 1986/87

Tahun	IBH / IHK
1974/75	67,54 ^{*)}
1975/76	81,11
1976/77	97,17
1977/78	108,93 ^{**)}
1978/79	121,77
1979/80	147,14
1980/81	172,14
1981/82	189,63
1982/83	205,99
1983/84	233,42
1984/85	242,07
1985/86	256,07
1986/87	279,49

Sumber : Biro Pusat Statistik, Indikator Ekonomi, Beberapa Penerbitan

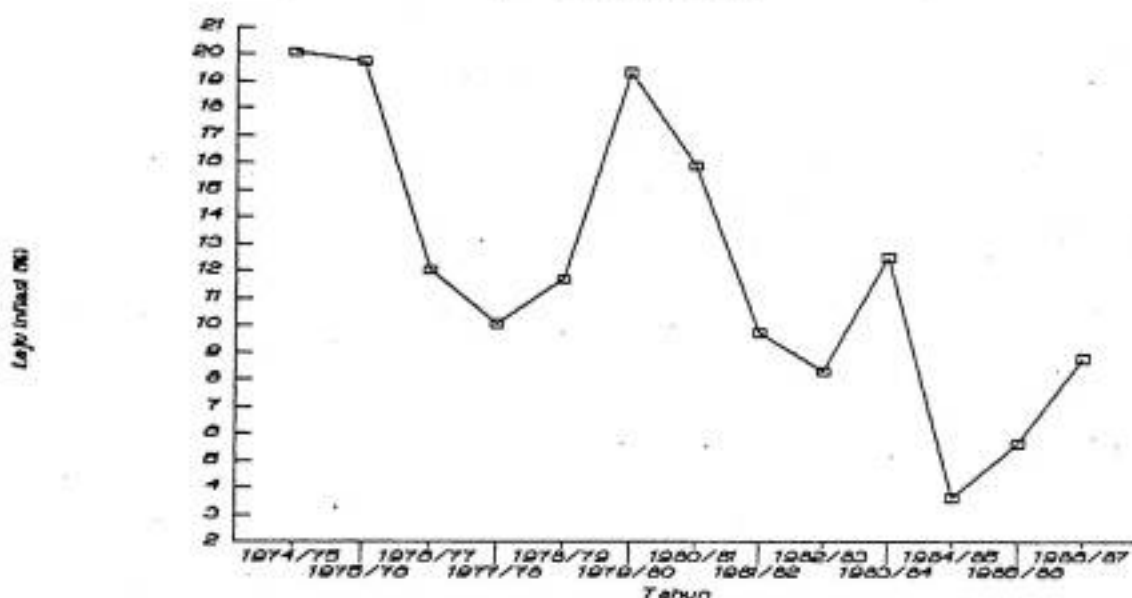
Ket : *) IBH 1974/75 - 1976/77
**) IHK 1977/78 - 1986/87

Tabel 4.2
INDONESIA :
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan, 1974/75 - 1986/87
(dalam persen)

Tahun	IBH / IHK
1974/75 ^{*)}	20,10
1975/76	19,80
1976/77	12,10
1977/78 ^{**)}	10,11
1978/79	11,79
1979/80	19,49
1980/81	16,05
1981/82	9,81
1982/83	8,37
1983/84	12,63
1984/85	3,64
1985/86	5,66
1986/87	8,83
Rata - rata (X)	12,18
Standar deviasi (S)	5,12
Koef. Variasi (KV)	0,42

Sumber : Bank Indonesia, Laporan Mingguan, beberapa penerbitan

Grafik 4.1
 INDONESIA :
 Perkembangan Laju Inflasi Tahunan
 1974/75 - 1986/87
 (dalam persen)



4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi

4.2.1 Jumlah Uang Beredar

Indonesia secara resmi menganut konsep jumlah uang beredar M1 (narrow money), dimana jumlah uang beredar (money supply) didefinisikan sebagai tagihan masyarakat terhadap sektor perbankan dan terbatas pada jumlah antara uang kartal dan uang giral. Uang kuasi yang berupa deposito berjangka dan tabungan bukan merupakan komponen jumlah uang beredar, melainkan hanya sebagai bagian dari likuiditas perbankan.¹

1. Sri Tua Arief, *Banking and Money in Indonesia : An Econometric Study*, Sri Tua Arief Associates, 1978.

Selama periode penelitian 1974/75 - 1986/87, terlihat bahwa laju pertumbuhan uang kartal (22.41%) lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan uang giral (25,1%). Akibatnya, terjadi pergeseran peran komponen uang beredar dalam perekonomian Indonesia, yang cenderung mengarah pada meningkatnya peran uang giral (lihat Tabel 4.3).

Tabel 4.3

INDONESIA :

Perkembangan Jumlah Uang Beredar (M_1)Komponennya, dan Uang Luas (M_2), 1974/75 - 1986/87

(dalam milyar Rp.)

Akhir Periode	Uang Kartal (C)		Uang Giral (DG)		Jumlah Uang Beredar (M_1)	Uang Kuasi (TD + SD)	Uang Luas (M_2)
	Rp	%	Rp	%			
1974/75	538	52,4	487	47,6	1.027	557	1.584
1975/76	659	46,2	769	53,8	1.428	834	2.262
1976/77	853	47,0	962	53,0	1.815	1.029	2.845
1977/78	1.036	49,08	1.075	50,92	2.111	1.164	3.275
1978/79	1.369	48,89	1.431	51,11	2.800	1.355	4.155
1979/80	1.774	46,72	2.023	53,28	3.797	2.006	5.803
1980/81	2.229	42,75	2.985	57,25	5.214	2.692	7.906
1981/82	2.541	37,51	4.254	62,49	6.775	3.376	10.151
1982/83	3.001	40,57	4.378	59,33	7.379	4.869	12.248
1983/84	3.554	44,12	4.501	55,88	8.055	7.704	15.759
1984/85	3.785	42,11	5.203	57,89	8.988	10.459	19.447
1985/86	5.044	48,15	5.431	51,85	10.475	13.693	24.168
1986/87	5.673	49,33	5.827	50,67	11.500	16.991	28.491
Laju Pertumbuhan	22,41 %		22,1 %		25,5 %	33,6 %	27,6 %

Sumber : Bank Indonesia, Laporan Tahunan Bank Indonesia, beberapa penerbitan

Kecenderungan ini memberi indikasi bergesernya sektor moneter Indonesia ke arah sektor yang lebih modern. Ini juga bisa memberikan implikasi makin sukarnya pengendalian jumlah uang beredar dan makin luasnya monetisasi kegiatan perekonomian subsisten, sehingga memberikan kecenderungan meningkatnya laju inflasi di Indonesia.

Menurunnya rasio uang kartal terhadap jumlah uang beredar secara cepat terjadi sejak tahun 1974/75 sampai 1976/77 dan kemudian pada periode 1979/80 sampai 1982/83 (lihat Grafik 4.2). Secara menyeluruh, terus terjadi penurunan peran uang kartal terhadap jumlah uang beredar selama periode 1974/75 sampai 1986/87.

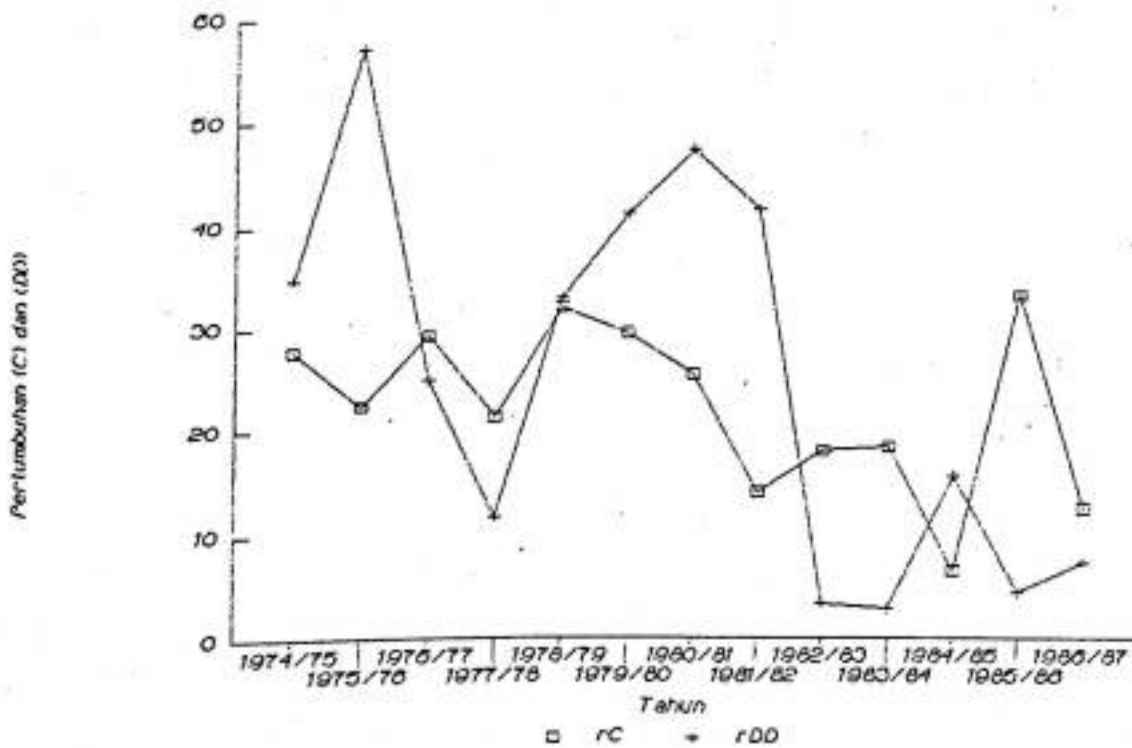
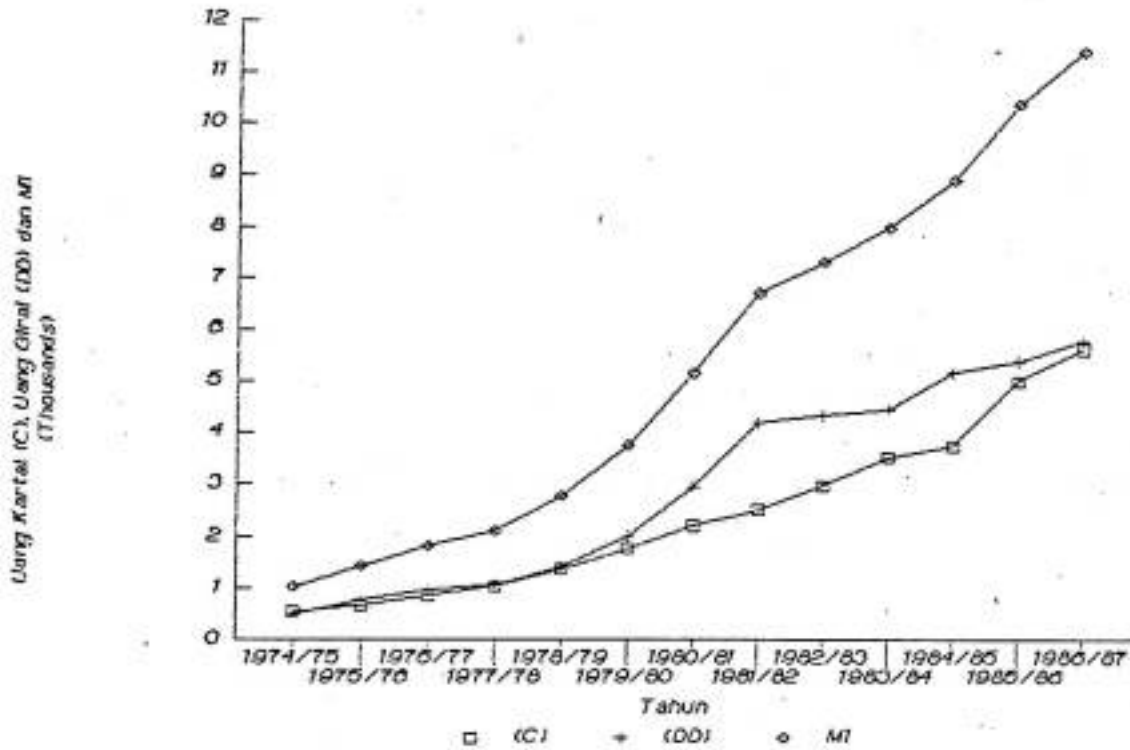
Uang kuasi yaitu deposito berjangka dan tabungan, tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan M_1 . Uang kuasi merupakan faktor dominan di dalam M_2 dibandingkan dengan M_1 . Walaupun demikian, untuk pembahasan selanjutnya, jumlah uang beredar didefinisikan sebagai M_1 , yaitu uang kartal ditambah uang giral, tak termasuk uang kuasi.

Hubungan antara laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan laju inflasi tahunan hampaknya tak terlalu kuat, hanya sebesar 0,75. Sementara itu, terlihat bahwa korelasi antara jumlah uang beredar dengan IHKI sangat erat, mencapai besaran 0,99.

INDONESIA :

Perkembangan Jumlah Uang Beredar (M_1), Komponennya
dan Peran Masing-masing Komponen

1974/75 - 1986/87



Sedangkan korelasi antara jumlah uang beredar dengan laju inflasi agak menunjukkan "keanehan", karena mempunyai nilai negatif (sebesar -0,70 dan -0,71). Matriks korelasi antara uang beredar dan pertumbuhannya dengan IHKI dan laju inflasi Indonesia selama periode 1974/75 sampai 1986/87 dapat diberikan sebagai berikut :

	M_1	IHKI	gM_1	$gIHKI$
M_1	1,0			
IHKI	0,99	1,0		
gM_1	-	-0,70	1,0	
$gIHKI$	-0,71	-	0,75	1,0

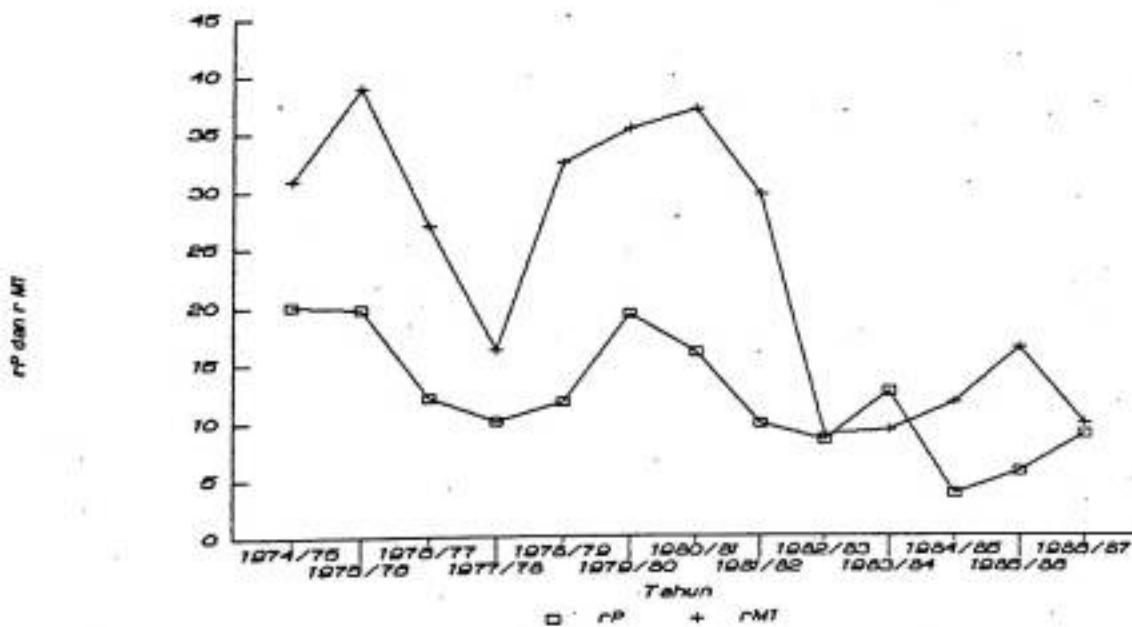
Dari beberapa hal di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah uang beredar (M_1) sangat mempengaruhi tingkat harga umum yang dicerminkan oleh IHKI dan secara tidak langsung mempengaruhi laju inflasi. Laju pertumbuhan jumlah uang beredar nampak mempengaruhi laju inflasi, walaupun tak terlalu besar. Timbul dugaan bahwa jumlah uang beredar lebih merupakan variabel antara (intervening variable) terhadap perkembangan inflasi di Indonesia dibandingkan sebagai variable yang mempengaruhi. Jumlah uang beredar menjembatani hubungan antara

variabel defisit domestik anggaran pemerintah atau neraca pembayaran dengan tingkat harga umum, dan karenanya dengan laju inflasi, melalui aspek moneterinya.

Grafik 4.3

INDONESIA :

Laju Pertumbuhan Tahunan Jumlah Uang Beredar (M_1),
dan Laju Inflasi Tahunan, Periode
1974/75 - 1986/87
(dalam persen)



Jumlah uang beredar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang merupakan tagihan dan kewajiban Bank Indonesia kepada masyarakat. Selama 1974/75 - 1986/87, faktor yang menyebabkan ekspansi jumlah uang beredar terutama adalah aktiva luar negeri

bersih, tagihan kepada lembaga dan perusahaan pemerintah dan tagihan kepada perusahaan swasta dan perorangan (1224 milyar, 438 milyar dan 1.726 milyar). Tagihan bersih pada pemerintah pusat lebih bersifat kontraktif (-713 milyar), kecuali pada tahun 1974/75, 1975/76, 1982/83 dan 1985/86. (Lihat Tabel 4.4)

Tabel 4.4

INDONESIA :

Perubahan Sebab-Sebab yang Mempengaruhi Jumlah

Uang Beredar 1974/1975 - 1986/87

(dalam milyar Rp)

Tahun	Aktiva Luar Negeri Bersih	Tagihan Bersih Pada Pemerintah Pusat	Tagihan Kepada Lembaga dan Perusahaan Pemerintah	Tagihan Kepada Perusahaan Swasta dan Perorangan	Deposito Berjangka dan Tabungan Lainnya	Lainnya
1974/75	+ 1	+ 25	+ 309	+ 239	- 138	- 193
1975/76	- 320	+ 25	+ 928	+ 337	- 277	+ 142
1976/77	+ 476	- 387	+ 402	+ 317	- 195	- 195
1977/78	+ 441	- 293	- 57	+ 365	- 135	- 175
1978/79	+ 647	- 291	+ 974	+ 632	- 191	- 1.237
1979/80	+ 2.541	- 1.179	+ 230	+ 558	- 650	- 604
1980/81	+ 2.297	- 1.820	+ 540	+ 1.297	- 657	- 205
1981/82	+ 22	- 164	+ 683	+ 1.921	- 684	- 217
1982/83	+ 229	+ 486	+ 382	+ 2.657	- 1.492	- 1.658
1983/84	+ 3.229	- 2.335	+ 278	+ 2.358	- 2.836	- 88
1984/85	+ 2.935	- 3.004	+ 190	+ 3.646	- 2.262	- 857
1985/86	+ 1.071	+ 1.142	+ 177	+ 3.657	- 3.234	- 1.326
1986/87	+ 2.344	- 1.475	+ 641	+ 4.527	- 3.298	- 2.114
Rata-rata	+ 1.224	- 713	+ 438	+ 1.726	- 1.238	- 671

Sumber : Bank Indonesia, Laporan Tahunan Bank Indonesia, Beberapa Penerbitan

Ekspansi jumlah uang beredar yang disebabkan Aktiva Luar Negeri Bersih dapat sedikit terendam oleh kontraksi tagihan bersih pada pemerintah pusat. Hal ini tampak pada tahun 1976/77, 1979/80, 1980/81, 1983/84 dan 1984/85, sehingga selisihnya dengan Kontribusi Aktiva Luar Negeri Bersih pada ekspansi uang beredar tak terlalu besar, yaitu masing-masing sebesar 6,2 %, 48,7 %, 12,6 %, 13,1 % dan -0,9 % (lihat Tabel 4.5)

Tabel 4.5

INDONESIA :

Tingkat Perubahan Jumlah Uang Beredar (M_1) Akibat Aktiva Luar Negeri Netto dan Tagihan Netto pada Pemerintah Pusat, 1974/75 - 1986/87

Tahun	Aktiva Luar Negeri Netto (%)	Tagihan pada Pemerintah Pusat (%)	Selisih
1974/75	0,1	3,2	3,3
1975/76	-31,2	2,4	-28,8
1976/77	33,3	-27,1	6,2
1977/78	26,2	-16,1	10,1
1978/79	30,6	-13,8	16,8
1979/80	90,8	-42,1	48,7
1980/81	60,5	-47,9	12,6
1981/82	0,4	-3,1	-2,7
1982/83	3,4	7,2	10,6
1983/84	44,7	-31,6	13,1
1984/85	36,4	-37,3	-0,9
1985/86	11,9	12,7	24,6
1986/87	22,4	-14,1	8,3

Sumber : diolah dari Tabel 4.4

Bila perkembangan kontribusi Aktiva Luar Negeri Bersih, penjumlahan jumlah uang beredar setelah sterilisasi oleh pemerintah pusat dilihat hubungannya dengan perkembangan laju inflasi, korelasinya sangat rendah, yaitu 0,068 dan -0,023.

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar dapat diterangkan melalui penjabaran komponen uang primer, di mana uang primer adalah penjumlahan antara Aktiva Luar Negeri Netto (NFA) dan Tagihan Domestik Netto (NDA) dari otoritas moneter.²

$$B = NFA + NDA \quad (1)$$

atau,

$$\Delta B = \Delta NFA + \Delta NDA \quad (2)$$

Perubahan Aktiva Luar Negeri Netto (NFA) tergantung pada saldo neraca berjalan dalam neraca pembayaran (Current Account = CA) dan Arus Netto Modal Internasional (Net Capital Inflows = K), sehingga :

$$\Delta B = K + CA + \Delta NDA \quad (3)$$

Komponen-komponen persamaan (3) ini dapat dipisahkan lebih lanjut dalam komponen pemerintah (g) maupun komponen swasta (p)

$$\Delta B = (K_g + K_p) + (CA_g + CA_p) + (\Delta NDA_g + \Delta NDA_p) \quad (4)$$

Otoritas moneter akan meningkatkan pinjamannya

2. Dr. Boediono, Ekonomi Moneter, BPFE Yogyakarta, Oktober 1985, hlm. 133.

terhadap pemerintah (NDA_g) bila pengeluaran pemerintah baik luar negeri maupun domestik, melebihi penerimaannya termasuk bantuan modal pemerintah yang berasal dari luar negeri.

$$\Delta NDA_g = (GDE + GFE) - (GDR + GFR) - K_g \quad (5)$$

dimana :

GDR dan GDE : penerimaan dan pengeluaran domestik pemerintah

GFR dan GFE : penerimaan dan pengeluaran luar negeri pemerintah

K_g : bantuan modal pemerintah dari luar negeri

Di lain pihak, saldo neraca berjalan pemerintah dalam neraca pembayaran (CA_g) dapat diartikan sebagai selisih antara penerimaan dengan pengeluaran luar negeri.

$$CA_g = GFR - GFE \quad (6)$$

Substitusi persamaan (5) dan (6) ke dalam persamaan (4) menghasilkan :

$$\begin{aligned} \Delta B = & K_g + (GFR - GFE) + CA_p + (GDE + GFE) \\ & - (GDR + GFR) - K_g + \Delta NDA_p \end{aligned}$$

Sehingga

$$\Delta B = K_p + CA_p + \Delta NDA_p + (GDE - GDR) \quad (7)$$

Persamaan (7) tersebut menjelaskan bahwa perubahan uang primer (B) ditentukan oleh saldo sektor swasta dalam neraca pembayaran (K_p dan CA_p), per-

bahan tagihan otoritas moneter terhadap sektor swasta domestik (ΔNDA_p) dan saldo domestik anggaran pemerintah (GDE - GFR). Perkembangan ketiga macam unsur uang primer ini, setelah berinteraksi dengan angka pengganda uang, akan menyebabkan terjadinya ekspansi atau kontraksi jumlah uang beredar, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat harga umum.

4.2.2 Defisit Domestik Anggaran Pemerintah

Sektor swasta yang belum kuat menyebabkan peran anggaran pemerintah sangat menentukan dalam investasi masyarakat. Hal ini diperlihatkan oleh elastisitas investasi terhadap pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang lebih kecil daripada satu, atau inelastis. Akan tetapi tampaknya peran pengeluaran pemerintah yang besar dalam investasi masyarakat tak dapat diimbangi oleh penerimaannya, sehingga timbul kesenjangan pendapatan-belanja negara, atau timbulnya defisit dalam keuangan negara.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, kesenjangan penerimaan belanja negara dibiayai dengan bantuan atau pinjaman luar negeri. Barulah sejak terjadinya boom minyak 1973/74, kesenjangan itu sebagian besar dibiayai oleh penerimaan yang berasal dari minyak dan gas alam. Selama periode penelitian, penerimaan minyak dan gas alam rata-rata menyumbang 49,41 %

dari total penerimaan pemerintah. Sedangkan bantuan luar negeri hanya menyumbang 17,32 % (lihat Tabel 4.6). Kedua pos penerimaan itu secara total menyumbang 66,73 %. Angka ini menunjukkan bahwa peran domestik dalam penerimaan pemerintah hanya sekitar 33,27 %. Bila pemerintah membelanjakan penerimaan minyak dan gas alam dan juga bantuan/pinjaman luar negeri di dalam negeri, maka defisit domestik anggaran pemerintah akan menambah tekanan inflasi melalui efek moneterinya terhadap jumlah uang beredar.

Tingginya harga minyak mentah Indonesia di pasaran dunia ini pulalah yang menyebabkan tabungan pemerintah dapat melampaui besarnya bantuan/pinjaman luar negeri (lihat Tabel 4.7). Tabungan pemerintah berperan rata-rata sebesar 64,8 %, sedangkan bantuan/pinjaman luar negeri hanya 35,62 % dari seluruh jumlah dana pembangunan. Walaupun pada tahun 1986/87 tabungan pemerintah turun drastis dari 7.301,3 milyar rupiah menjadi 2.581 milyar rupiah (turun 64,6 %), akibat merosotnya harga minyak. Sementara itu bantuan luar negeri meningkat 61,01 % dari tahun sebelumnya menjadi 5.752 milyar rupiah. Dana Pembangunan menurun 23,36 %, dari 10.873,9 milyar rupiah pada tahun 1985/86 menjadi 8.333,5 milyar rupiah pada tahun 1986/87.

Tabel 4.6

INDONESIA :

Perkembangan Komposisi Penerimaan Pemerintah

1974/75 - 1986/87

(dalam persen)

Tahun	Penerimaan Dalam Negeri			Penerimaan Pembangunan			Total Penerimaan
	Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam	Penerimaan diluar minyak Bumi dan Gas Alam	Jumlah	Bantuan Program	Bantuan Proyek	Jumlah	
1974/75	45,57	43,27	88,84	1,83	7,90	11,73	100,00
1975/76	48,71	34,40	83,11	0,74	17,07	17,81	100,00
1976/77	44,59	34,49	79,08	0,28	21,00	21,27	100,00
1977/78	45,23	36,62	81,85	0,63	17,12	17,75	100,00
1978/79	43,53	36,92	80,45	0,91	18,62	19,53	100,00
1979/80	52,72	30,17	82,89	0,80	16,30	17,10	100,00
1980/81	59,89	27,37	87,26	0,35	12,20	12,55	100,00
1981/82	61,97	25,75	87,72	0,32	11,95	12,27	100,00
1982/83	56,50	29,58	86,08	0,11	13,41	13,52	100,00
1983/84	51,98	26,82	78,80	0,08	21,12	21,20	100,00
1984/85	53,81	28,29	82,10	0,36	17,59	17,94	100,00
1985/86	48,82	35,52	84,34	0,30	15,35	15,65	100,00
1986/87	28,95	44,78	73,73	8,94	17,33	26,27	100,00

Sumber : Departemen Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN 1990/1991

Pengeluaran rutin pemerintah meningkat dengan laju pertumbuhan yang lebih rendah dari pengeluaran pembangunan (26,1 % dibandingkan 29,7 %). Satu hal yang patut diberikan perhatian adalah kecenderungan menurunnya ratio pengeluaran rutin yang dibiayai oleh penerimaan dalam negeri bukan minyak, dari 90,71 % pada Pelita I menjadi 75,09 % dan 57,16 % pada Pelita II dan III. Perkembangan ini kurang

sehat, karena anggaran belanja pemerintah menjadi sangat tergantung pada penerimaan minyak.³ Tetapi pada 3 tahun pertama Pelita IV, angka ini agak meningkat menjadi 58,1 %, 67,8 % dan 72,3 %. Penerimaan diluar migas menunjukkan prestasi yang terus meningkat. Perkembangan ini tampaknya sejalan dengan strategi kebijaksanaan pembangunan untuk tidak terlalu tergantung pada penerimaan migas sebagaimana yang telah terjadi pada Pelita-pelita terdahulu.

Dari Grafik 4.4 dapat dilihat perkembangan dari pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan dan total pengeluaran pemerintah, yang ternyata agak bisa memberikan gambaran keeratan hubungannya dengan perkembangan jumlah uang beredar. Korelasi antara indeks jumlah uang beredar dengan indeks pengeluaran rutin, indeks pengeluaran pembangunan dan indeks total pengeluaran pemerintah selama periode 1974/75 - 1986/87 masing-masing adalah 0,99, 0,95 dan 0,99.

Dengan melihat pola fluktuasi pengeluaran pemerintah yang hampir mirip pola fluktuasi jumlah uang beredar dapat diambil kesimpulan sementara bahwa ada kaitan yang cukup erat antara anggaran

3. Anne Booth and Peter McCawley, *Ekonomi Orde Baru*, LP3ES Jakarta, 1982, hlm. 191.

dengan jumlah uang beredar. Transmisi pengaruh anggaran terhadap jumlah uang beredar adalah melalui defisit domestik anggaran pemerintah dan uang primer.

Tabel 4.7

INDONESIA :

Realisasi Anggaran Pemerintah (1974/75 - 1986/87)

(dalam milyar Rp)

Tahun	Penerimaan D.N	Pengeluaran Rutin	Tabungan Pemerintah	Bantuan L.N	Dana Peabangunan	Pengeluaran Peabangunan
1974/75	1.753,7	1.016,1	737,6	232,0	969,6	961,8
1975/76	2.241,9	1.332,5	909,3	491,6	1.400,9	1.397,7
1976/77	2.906,0	1.629,7	1.276,2	783,8	2.060,0	2.054,5
1977/78	3.535,4	2.148,9	1.366,5	773,4	2.159,9	2.156,8
1978/79	4.266,1	2.743,7	1.522,4	1.035,5	2.537,9	2.536,6
1979/80	6.696,8	4.061,8	2.635,0	1.381,1	4.016,1	4.014,2
1980/81	10.227,0	5.800,0	4.427,0	1.493,8	5.920,8	5.916,1
1981/82	12.212,6	6.977,6	5.235,0	1.709,0	6.944,0	6.940,1
1982/83	12.418,3	6.996,3	5.422,0	1.940,0	7.362,0	7.339,6
1983/84	14.432,7	8.411,6	6.020,9	3.862,4	9.903,3	9.899,1
1984/85	15.905,5	9.429,0	6.476,5	3.478,0	9.954,5	9.951,9
1985/86	19.252,8	11.951,5	7.301,3	3.572,6	10.873,9	10.873,1
1986/87	16.140,6	13.559,3	2.581,3	5.732,2	6.333,5	8.332,0

Sumber : Departemen Keuangan, "Nota Keuangan dan RAPBN 1990/91"

Ada beberapa konsep anggaran yang dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya pada permintaan agregat (aggregate demand), seperti Konsep Saldo Anggaran keseluruhan, Konsep Nilai Netto, Konsep Defisit Domestik dan Konsep Defisit Moneter. Pemerintah Indonesia menggunakan Konsep Nilai Netto,

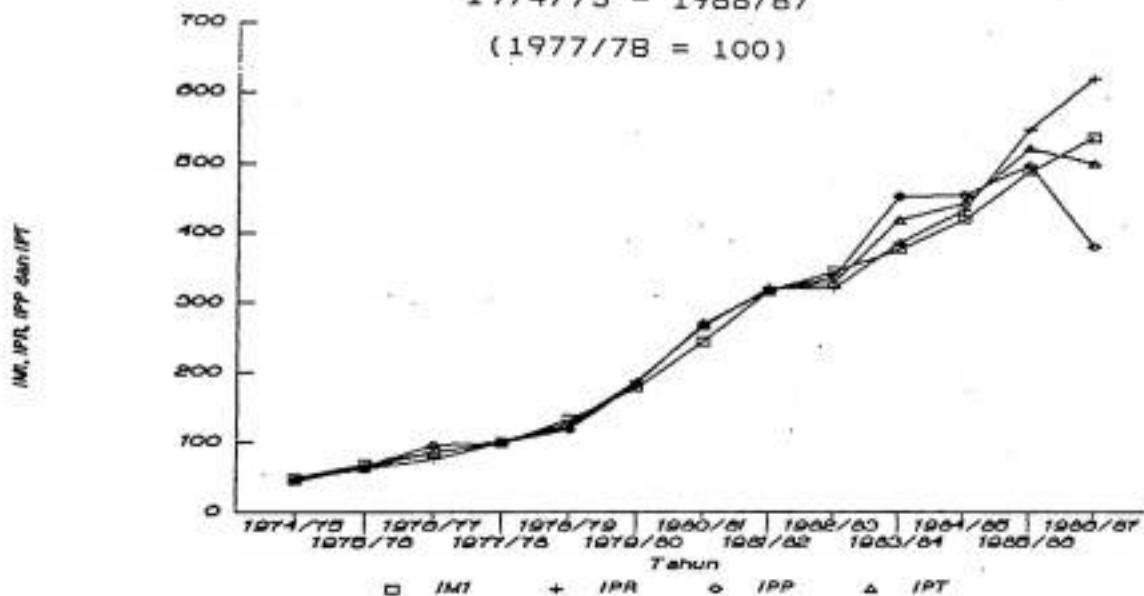
Grafik 4.4

INDONESIA :

Indeks Perkembangan Jumlah Uang Beredar (IM_1)
 Pengeluaran Rutin (IP_R), Pengeluaran Pembangunan (IP_P)
 dan Total Pengeluaran Pemerintah (IP_T)

1974/75 - 1986/87

(1977/78 = 100)



yaitu konsep anggaran yang menunjukkan saldo rekening lancar APBN sebagai besarnya tabungan pemerintah guna membiayai pengeluaran pembangunan, dan salah satu sasaran kebijaksanaan anggaran di Indonesia adalah menghilangkan ketergantungan pada dana bantuan/pinjaman dari luar negeri sehingga tabungan pemerintah harus terus ditingkatkan. Konsep Saldo Anggaran keseluruhan dimaksudkan untuk mengukur besarnya pinjaman pemerintah pada sektor perbankan, masyarakat non-perbankan dan dari luar negeri.

Sedangkan Konsep Defisit Moneter mengukur besarnya pinjaman pemerintah pada sektor perbankan

saja, di mana bantuan luar negeri juga dianggap sebagai penerimaan. Ketiga macam konsep ini nampaknya kurang tepat digunakan untuk melihat pengaruh ekonomis anggaran belanja pada permintaan agregat domestik dan tingkat harga umum.⁴

Oleh karena itu, perlu atau lebih tepat bila digunakan konsep Defisit Domestik Anggaran Pemerintah. Konsep ini bisa digunakan untuk mengukur pengaruh kebijaksanaan fiskal pada perekonomian domestik suatu negara yang mengalami arus penerimaan dan pengeluaran luar negeri dalam jumlah yang cukup besar melalui anggaran pemerintah. Yang menjadi masalah kemudian adalah, mengingat tak ada satu negarapun, termasuk Indonesia, yang mencatat besarnya penerimaan dan pengeluaran yang berorientasi pada ekonomi dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, perlu dilakukan taksiran atau perkiraan berdasarkan asumsi-asumsi tertentu.

Dalam hal ini, penulis menggunakan asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh Anton Hermanto Gunawan dalam upayanya menghitung besar defisit domestik anggaran.⁵ Untuk itu perlu dilakukan beberapa tahapan pengolahan, yaitu :

4. Ibid

5. Anton Hermanto Gunawan, *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*, PAU-Ekonomi-UI Jakarta, 1991, hlm. 253.

Tabel 4.8

INDONESIA :

Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah 1974/75 - 1986/87

(dalam milyar Rp)

	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87
PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.753,7	2.241,9	2.906,0	3.535,4	4.266,1	4.696,8	10.227,0	12.212,6	12.418,3	14.432,7	15.905,5	19.252,6	16.140,6
1. Penerimaan Migas	957,2	1.248,0	1.635,3	1.948,7	2.308,7	4.289,6	7.019,6	8.627,8	8.170,4	9.320,2	10.425,9	11.144,4	6.337,6
2. Penerimaan Lainnya	796,5	993,9	1.270,7	1.586,7	1.957,4	2.407,2	3.207,4	3.584,8	4.247,9	4.912,5	5.479,6	8.108,2	9.803,0
PENERIMAAN PEMBANTUAN	272,0	491,0	781,9	773,4	1.033,3	1.351,1	1.497,8	1.709,0	1.940,0	3.882,4	3.478,0	3.572,6	5.792,0
1. Bantuan Program	36,1	20,2	10,2	35,8	48,2	64,8	64,1	45,1	15,1	14,9	69,3	69,2	1.957,5
2. Bantuan Proyek	195,9	471,4	773,6	737,6	987,3	1.316,3	1.429,7	1.663,9	1.924,9	3.867,5	3.408,7	3.503,4	3.794,7
PENGELUARAN RUTIN	1.016,1	1.332,5	1.629,7	2.148,9	2.743,7	4.061,8	5.890,0	6.977,6	6.995,3	8.411,8	9.429,0	11.951,5	13.559,3
1. Belanja Pegawai													
a. Dalam Negeri	410,3	581,2	622,3	675,4	977,9	1.390,8	1.969,3	2.233,7	2.372,4	2.691,0	2.974,7	3.936,1	4.201,0
b. Luar Negeri	9,8	12,7	14,3	14,8	23,7	29,1	34,0	43,4	43,7	66,0	72,1	82,2	109,5
2. Belanja Barang													
a. Dalam Negeri	158,4	283,1	320,8	358,6	398,0	540,0	638,0	891,0	1.007,0	1.007,0	1.134,0	1.310,0	1.293,0
b. Luar Negeri	16,8	21,7	18,9	18,2	21,0	25,0	33,0	32,0	34,0	50,0	49,0	57,0	73,0
3. Subsidi D.O	201,9	284,5	313,0	478,4	522,3	669,9	976,1	1.209,1	1.315,4	1.547,0	1.680,1	2.247,6	2.410,2
4. Cicilan Utang													
a. Dalam Negeri	6,4	6,8	24,4	7,3	9,0	36,0	31,0	16,0	20,0	30,0	39,0	20,0	0,0
b. Luar Negeri	67,3	71,7	165,1	221,0	526,7	647,6	754,0	915,6	1.204,7	2.072,8	2.737,2	3.303,1	5.056,1
5. Lain-lain	145,2	70,8	190,9	172,2	265,8	718,9	1.345,9	1.637,6	997,1	948,1	539,6	754,0	174,1
PENGELUARAN PEMBANTUAN	961,8	1.397,7	2.054,5	2.156,8	2.586,6	4.014,2	5.196,1	6.940,1	7.359,6	9.899,1	9.951,9	10.873,1	8.332,0
1. Pelebiayaan Rp	765,9	926,3	1.280,9	1.419,2	1.568,3	2.697,9	4.486,4	5.276,2	5.434,7	6.031,7	6.543,2	7.369,7	4.537,3
2. Bantuan Proyek	195,9	471,4	773,6	737,6	987,3	1.316,3	1.429,7	1.663,9	1.924,9	3.867,5	3.408,7	3.503,4	3.794,7

Sumber : Departemen Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN 1990/91

1. Pemisahan komponen luar negeri dan domestik dari segi penerimaan pemerintah, dipakai asumsi bahwa penerimaan (yang berorientasi pada perekonomian) luar negeri terdiri atas seluruh penerimaan pembangunan ditambah dengan penerimaan migas. Penerimaan migas dianggap sebagai penerimaan luar negeri mengingat subyek pajaknya yang kebanyakan perusahaan asing dan pengaruhnya terhadap daya beli perekonomian domestik yang hampir tidak ada. Ini disebabkan oleh akan dialihkannya penghasilan minyak tersebut keluar Indonesia bila tidak dikenakan pajak tersebut. Setelah diperoleh besarnya penerimaan luar negeri, maka penerimaan domestik merupakan selisih antara total penerimaan luar negeri tersebut.
2. Dari segi pengeluaran, terlebih dahulu dipisahkan komponen pengeluaran yang langsung dapat dikelompokkan sebagai pengeluaran luar negeri, karena impornya 100 %, seperti belanja pegawai luar negeri, belanja barang luar negeri, cicilan utang dan bunga luar negeri, dan pengeluaran pembangunan bantuan proyek. Selain itu, ada beberapa jenis pengeluaran lain yang tidak seluruhnya dapat dianggap sebagai pengeluaran dalam negeri, yaitu belanja barang dalam negeri, pengeluaran rutin lain-lain dan pengeluaran

Tabel 4.9

INDONESIA :

Total Penerimaan Pemerintah, Penerimaan Luar Negeri dan
Penerimaan Domestik, 1974/75 - 1986/87
(dalam milyar Rp)

Tahun	Total Penerimaan Pemerintah	Penerimaan Luar Negeri			Penerimaan Domestik
		Penerimaan Migas	Penerimaan Pembangunan	Total	
1974/75	1.985,7	957,2	232,0	1.189,2	796,5
1975/76	2.733,5	1.248,0	491,6	1.739,6	993,9
1976/77	3.689,8	1.635,3	783,8	2.419,1	1.270,7
1977/78	4.308,8	1.948,7	773,4	2.722,1	1.586,7
1978/79	5.301,6	2.308,7	1.035,5	3.344,2	1.957,4
1979/80	6.077,9	4.259,6	1.381,1	5.640,7	2.437,2
1980/81	11.720,8	7.019,6	1.493,8	8.513,4	3.207,4
1981/82	13.921,6	8.627,8	1.709,0	10.336,8	3.584,8
1982/83	14.358,3	8.170,4	1.940,0	10.110,4	4.247,9
1983/84	18.315,1	9.520,2	3.882,4	13.402,6	4.912,5
1984/85	19.363,5	10.429,9	3.478,0	13.907,9	5.475,6
1985/86	22.825,4	11.144,4	5.572,6	14.717,0	8.108,4
1986/87	21.892,8	6.337,6	5.752,2	12.084,8	9.803,0

Sumber : diolah dari Tabel 4.8

pembangunan di luar bantuan proyek; karena adanya komponen impor yang terkandung didalamnya. Untuk memperkirakan besarnya komponen impor tersebut digunakan beberapa asumsi, yaitu bahwa belanja barang dalam negeri dan pengeluaran rutin lain-lain (sebagai bagian dari pengeluaran rutin), dianggap sebagai bagian dari pengeluaran konsumsi pemerintah (Government Consumption Expenditure) sedangkan pengeluaran pembangunan

diluar bantuan proyek dianggap sebagai bagian dari investasi masyarakat atau lebih tepat dikatakan sebagai bagian dari Pembentukan Modal Domestik Bruto (Gross Domestic Capital Formation). Dari Tabel Input-Output dapat diperoleh besarnya nilai import yang terkandung di dalam pengeluaran konsumsi pemerintah (G) dan pembentukan modal domestik bruto (I), sebagai bagian permintaan akhir. Rasio antara nilai impor yang terkandung dalam pengeluaran konsumsi pemerintah (M_G) terhadap pengeluaran konsumsi pemerintah itu sendiri, digunakan sebagai taksiran besarnya komponen luar negeri dalam pengeluaran rutin lain-lain dan belanja barang luar negeri. Demikian juga rasio antara nilai impor yang terkandung di dalam pembentukan modal domestik bruto (M_I) terhadap pembentukan modal domestik bruto (I), digunakan sebagai taksiran besarnya komponen luar negeri dalam pengeluaran pembangunan di luar bantuan proyek. Rasio-rasio tersebut setelah dikalikan dengan besarnya pengeluaran masing-masing ditambah dengan pengeluaran luar negeri yang komponennya dianggap 100 %, menghasilkan pengeluaran luar negeri yang dilakukan pemerintah.

Tabel 4.10
INDONESIA :
Perkiraan Komponen Luar Negeri
dan Domestik dari Anggaran dan Pengeluaran Pemerintah
1974/75 - 1986/87
(dalam persen)

Tahun	1974/75 - 1979/80		1980/81 - 1984/85		1985/86 - 1986/87	
	Komponen Luar Negeri	Komponen Domestik	Komponen Luar Negeri	Komponen Domestik	Komponen Luar Negeri	Komponen Domestik
PENERIMAAN DALAM NEGERI						
1. Penerimaan Migas	100,0	-	100,0	-	100,0	-
2. Penerimaan Lainnya	-	100,0	-	100,0	-	100,0
PENERIMAAN PEMBANGUNAN						
1. Bantuan Program	100,0	-	100,0	-	100,0	-
2. Bantuan Proyek	100,0	-	100,0	-	100,0	-
PENGELUARAN RUTIN						
1. Belanja Pegawai						
a. Dalam Negeri	-	100,0	-	100,0	-	100,0
b. Luar Negeri	100,0	-	100,0	-	100,0	-
2. Belanja Barang						
a. Dalam Negeri	12,2	87,8	9,9	90,1	9,1	90,9
b. Luar Negeri	100,0	-	100,0	-	100,0	-
3. Subsidi D.O	-	100,0	-	100,0	-	100,0
4. Cicilan Utang						
a. Dalam Negeri	-	100,0	-	100,0	-	100,0
b. Luar Negeri	100,0	-	100,0	-	100,0	-
5. lain-lain	12,2	87,8	9,9	90,1	9,1	90,9
PENGELUARAN PEMBANGUNAN						
1. Pembiayaan Rp	36,1	63,9	24,6	75,4	17,5	82,5
2. Bantuan Proyek	100,0	-	100,0	-	100,0	-

Sumber : Biro Pusat Statistik, Tabel Input-Output Indonesia Tahun 1975, 1980 dan 1985.

Tabel 4.11
INDONESIA :
Pengeluaran Luar Negeri, 1974/75 - 1986/87
 (dalam milyar Rp)

	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87
PENGELUARAN													
RUTIN													
1. Belanja Pegawai Luar Negeri	9,8	12,7	14,3	14,8	23,7	29,1	34,0	43,4	45,7	66,0	72,1	82,2	109,6
2. Belanja Barang Dalam Negeri (BBDN)													
a. 12,2 % x BBDN	19,32	34,51	39,14	43,75	48,56	65,88							
b. 9,9 % x BBDN							63,2	88,2	99,7	99,7	112,3		
c. 9,1 % x BBDN												119,21	117,7
3. Belanja Barang Luar Negeri	16,8	21,7	18,9	18,2	21,0	29,0	33,0	32,0	34,0	50,0	49,0	57,0	73,0
4. Cicilan Utang Luar Negeri	67,3	71,7	165,1	221,0	525,7	647,6	754,0	915,3	1.204,7	2.072,8	2.737,8	3.303,1	3.058,1
5. Lain-lain (PRLL)													
a. 12,2 % x PRLL	17,1	8,64	18,41	21,0	32,4	87,7							
b. 9,9 % x PRLL							133,2	162,1	98,7	53,9	53,4		
c. 9,1 % x PRLL												68,8	13,8
PENGELUARAN													
PENGANGKUTAN													
1. Fasilitas (Rp. PPPR)													
a. 26,1 % x PPPR	276,47	334,77	452,40	512,3	566,2	973,9							
b. 25,8 % x PPPR							1.103,7	1.297,9	1.336,9	1.483,8	1.609,6	1.287,7	794,0
c. 17,5 % x PPPR													
2. Bantuan Proyek	193,9	471,4	773,6	737,6	987,3	1.316,3	1.429,7	1.663,9	1.924,9	3.867,5	3.408,7	3.503,4	3.794,7
Jumlah	603,32	955,07	1.491,85	1.586,7	2.204,9	3.149,3	3.550,8	4.202,8	4.744,6	7.733,7	8.042,3	8.423,2	7.962,9

Sumber : diolah dari Tabel 4.8 dan Tabel 4.10

Selisih pengeluaran total dengan pengeluaran luar negeri tersebut merupakan pengeluaran domestik.

Tabel 4.12

INDONESIA :

Total Pengeluaran Pemerintah, Pengeluaran Luar Negeri
dan Pengeluaran Domestik, 1974/75 - 1986/87

(dalam milyar Rp)

Tahun	T o t a l Pengeluaran Pemerintah	Pengeluaran Luar Negeri	Pengeluaran Domestik
1974/75	1.977,9	603,3	1.374,6
1975/76	2.730,2	955,1	1.775,1
1976/77	3.684,2	1.491,9	2.192,3
1977/78	4.305,7	1.568,7	2.737,0
1978/79	5.300,3	2.204,9	3.095,4
1979/80	8.076,0	3.149,5	4.926,5
1980/81	11.716,1	3.550,7	8.165,4
1981/82	13.917,7	4.202,8	9.714,9
1982/83	14.355,9	4.744,6	9.611,3
1983/84	18.310,9	7.733,7	10.577,2
1984/85	19.380,9	8.042,3	11.338,6
1985/86	22.824,6	8.423,2	14.401,4
1986/87	21.891,3	7.962,9	13.928,4

Sumber : diolah dari Tabel 4.9 dan Tabel 4.11

3. Defisit domestik anggaran pemerintah merupakan selisih antara penerimaan domestik dengan dengan pengeluaran domestiknya.

Tabel 4.13

INDONESIA :

Penerimaan Domestik Pemerintahan, Pengeluaran
Domestik Pemerintah dan Defisit Domestik Anggaran
Pemerintah, 1974/75 - 1986/87

(dalam milyar Rp)

Tahun	Penerimaan Domestik Pemerintah	Pengeluaran Domestik Pemerintah	Defisit Domestik Anggaran Pemerintah
1974/75	796,5	1.374,6	578,10
1975/76	993,9	1.775,1	781,2
1976/77	1.270,7	2.192,3	921,6
1977/78	1.586,7	2.737,0	1.150,3
1978/79	1.957,4	3.095,4	1.138,1
1979/80	2.437,2	4.926,5	2.489,3
1980/81	3.207,4	8.165,4	4.958,0
1981/82	3.584,8	9.714,9	6.130,1
1982/83	4.247,9	9.611,3	5.363,4
1983/84	4.912,5	10.577,2	5.664,7
1984/85	5.475,6	11.338,6	5.863,0
1985/86	8.108,6	14.401,4	6.292,8
1986/87	9.803,0	13.928,4	4.125,4

Sumber : diolah dari Tabel 4.9 dan Tabel 4.12

4.2.3 Inflasi yang Diimpor

Perkembangan perekonomian Indonesia yang makin terbuka menyebabkan sangat pekanya perekonomian domestik terhadap gejolak perekonomian dunia. Keterbukaan itu tercermin dari rasio perdagangan luar negeri terhadap produksi nasional, 27,30 % untuk ekspor dan 21,51 % untuk impor pada tahun 1987 (dinilai atas dasar harga konstan 1983).

Gejolak harga komoditi impor maupun ekspor di pasaran dunia akan turut mempengaruhi besarnya tingkat harga umum di dalam negeri sehingga terjadi imported inflation. Ichoro Otani⁶ mengatakan bahwa inflasi yang diimpor dapat terjadi karena adanya peningkatan harga ekspor cenderung menaikkan penerimaan ekspor (asumsi barangnya inelastis) sehingga akan meningkatkan permintaan domestik yang menekan tingkat harga untuk naik. Di lain pihak, naiknya penerimaan ekspor (berarti meningkatnya saldo neraca berjalan) akan meningkatkan uang primer, sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan jumlah uang beredar. Kelebihan jumlah uang beredar ini mendorong tingkat harga untuk naik pula.

6. Ichiro Otani, Inflation in an Open Economy : A case Study of the Philippines, IMF Staff Papers, Vol. XXII, no. 3, November 1975.

Peningkatan harga impor akan mempengaruhi tingkat harga umum melalui tiga saluran⁷, yaitu pertama, secara langsung meningkatkan indeks harga umum ; kedua, melalui peningkatan biaya input bahan baku dan barang modal sehingga mendorong kenaikan harga ; dan ketiga, melalui peningkatan pengeluaran impor, yang berarti saldo neraca berjalan turun sehingga jumlah uang primer pun turun. Akibatnya, terjadi kontraksi jumlah uang beredar akibat peningkatan ekspor.

Selama periode penelitian, tingkat harga ekspor meningkat jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan tingkat harga impor. Rata-rata laju pertumbuhan indeks implisit ekspor Indonesia sebesar 25,1 % pertahun, sedangkan untuk impor sebesar 11,10 %. Peningkatan terbesar pada tingkat harga impor terjadi pada tahun 1974 dan 1979 masing-masing sebesar 31,79 % dan 30,12 %. Sedangkan peningkatan harga ekspor terbesar terjadi pada tahun 1974 dan 1979 juga sebesar 110,69 % dan 93,83 %.

Dalam menganalisis tingkat inflasi dunia, Bank Dunia menggunakan indikator Unit Value Index of Manufactured Exports (SITC 5 - 8) dari negara maju ke negara berkembang. Indeks harga internasional

7. Ibid.

ini, setelah disesuaikan dengan perubahan nilai tukar valuta asing yang ada, dalam hal ini kurs rupiah terhadap dollar Amerika, digunakan sebagai indikator inflasi yang diimpor. Hubungan antara indeks harga internasional, yang telah memperhitungkan perkembangan kurs valuta asing dengan tingkat harga umum korelasinya 0,9740.

Tabel 4.14
Indeks Harga Internasional
(1974/75 - 1986/87)

Tahun	Indeks Harga Internasional	Kurs US\$ (Rp/US\$)	I. H. Internasional setelah penyesuaian Kurs (US\$)
1974/75	79,81	415,00	79,81
1975/76	90,70	415,00	90,70
1976/77	92,36	415,00	92,36
1977/78	101,05	415,00	101,05
1978/79	105,96	442,05	112,87
1979/80	110,66	623,06	166,13
1980/81	125,48	626,99	189,58
1981/82	135,73	631,76	206,62
1982/83	132,93	661,42	211,86
1983/84	125,99	909,30	276,06
1984/85	130,41	1.025,90	322,37
1985/86	131,59	1.100,60	348,98
1986/87	132,62	1.282,60	409,88

Sumber : - The World Bank, "Half-Yearly Revision of Commodity Prices Forecasts and Quaterly Review of Commodity Markets", Office Memorandum, 1987.
- The World Bank, "World Tables 1991", 1991.

4.2.4 Produksi Bahan Makanan

Ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap sektor pertanian tercermin dari peran nilai tambahnya yang relatif besar serta daya serap tenaga kerjanya yang demikian tinggi, di samping tingkat produktivitas yang rendah dan beban penduduk yang cukup tinggi, menyebabkan tingkat harga bahan makanan meningkat cukup cepat. Juga terjadinya perpindahan tenaga kerja pertanian ke sektor non-pertanian ke daerah perkotaan, menambah berat beban permintaan akan bahan makanan, sementara penawarannya pun tak dapat berkembang cepat mengikuti permintaan.

Tingkat pertumbuhan nilai tambah produksi tanaman bahan makanan selama periode penelitian hanya 4,7 %. Terjadi kenaikan pertumbuhan dari Pelita II (3,18 %) ke Pelita II (5,65 %), kemudian terjadi penurunan selama 3 tahun terakhir periode penelitian sebesar 4,25 %, 3,34 % dan 2,51 %.

Jika indeks fluktuasi nilai tambah produksi tanaman bahan makanan terhadap trend jangka panjangnya dapat dianggap sebagai cerminan dari dari penawaran dan permintaannya, maka pada tahun 1977/78 - 1982/83 terjadi kelebihan permintaan akan tanaman bahan makanan. Kekurangan produksi tanaman bahan makanan yang agak besar terjadi pada tahun 1979/80, 1980/81, 1981/82, dimana deviasinya terhadap

trend jangka panjangnya adalah 10,87 %, 14,74 % dan 10,14 %. Ini mengakibatkan tingkat harganya meningkat sebesar 17,9 %, 19,6 % dan 16,9 %. (Lihat Tabel 4.15).

Tabel 4.15

INDONESIA :

Perkembangan Nilai Tambah Produksi Tanaman Bahan Makanan, Trend Jangka Panjangnya dan Indeks Fluktuasinya (1973/74 - 1986/87)

Tahun	Nilai Tambah Produksi TBM (milyar Rp) ¹⁾	Nilai Tambah Produksi TBM Riil (milyar Rp) ²⁾	Trend Jangka Panjang Produksi TBM Riil (milyar Rp) ³⁾	Indeks Fluktuasi Produksi TBM Riil ⁴⁾ (IAGDT)
1973/74	1.573,0	29,15	25,67	113,57
1974/75	2.096,0	31,03	27,89	111,26
1975/76	2.554,8	31,50	30,11	104,61
1976/77	3.043,9	31,33	32,33	96,90
1977/78	3.659,9	33,60	34,55	90,24
1978/79	3.991,4	32,78	36,78	89,13
1979/80	4.892,0	33,25	39,00	85,26
1980/81	6.357,6	36,93	41,22	89,59
1981/82	8.101,8	42,72	43,44	98,34
1982/83	9.961,0	48,36	45,66	105,91
1983/84	12.380,9	53,04	47,89	110,77
1984/85	12.691,8	52,43	50,11	104,64
1985/86	13.860,2	54,13	52,33	103,44
1986/87	15.084,9	53,97	54,55	96,94

Keterangan : 1) Nilai Tambah Bruto Tanaman Bahan Makanan atas dasar harga berlaku.

2) Nilai Tambah Bruto Tanaman Bahan Makanan atas dasar harga berlaku dibagi IBH/IHK.

3) Persamaan Jangka Panjangnya :

$$TBM = 23,45 + 2,22 t$$

4) Fluktuasi terhadap trend jangka panjangnya.

sumber : Departemen Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN 1990/91 dan dari Tabel 4.1.

Korelasi antara indeks fluktuasi produksi tanaman bahan makanan tenggang waktu satu tahun ($ITBM_{t-1}$) dengan tingkat harga umum sangat kecil, hanya sebesar $-0,0676$. Hal ini menunjukkan ketatnya usaha pemerintah (BULOG) dalam mengatur tingkat harga kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga rendahnya korelasi ini bisa dipahami, karena kontribusi kenaikan tingkat harga tanaman bahan makanan (beras) dalam pembentukan tingkat harga umum (IBH/IHK) cukup besar.

4.2.5 Produksi Minyak dan Gas Bumi

Dalam pembiayaan pembangunan Indonesia, minyak dan gas bumi memegang peranan cukup penting. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Total Penerimaan Pemerintah selama periode penelitian mencapai rata-rata $49,41\%$. Selain itu komoditi minyak dan gas bumi merupakan sumber penghasil devisa terbesar sejak boom minyak. Akan tetapi perkembangan harga minyak yang cenderung menurun akhir-akhir ini, menyebabkan pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak, sehingga hal ini berakibat akan mendorong kenaikan yang cukup besar pada tingkat harga umum.

Nilai tambah produksi pertambangan dan penggalian bertumbuh sebesar $5,03\%$ selama Pelita II dan $-1,67\%$ selama Pelita III dan rata-rata $0,69\%$ selama tahun 1984/85 - 1986/87.

Tabel 4.16

INDONESIA :

Perkembangan Nilai Tambah Produksi Pertambangan dan
Penggalian, Trend Jangka Panjangnya dan Indeks Fluktuasinya
(1973/74 - 1986/87)

Tahun	Nilai Tambah Produksi Tambang dan Penggalian (milyar Rp) ¹⁾	Nilai Tambah Produksi Tambang dan Penggalian Riil (milyar Rp) ²⁾	Trend Jangka Panjang Produksi Tambang dan Penggalian Riil (milyar Rp) ³⁾	Indeks Fluktuasi Produksi Tambang dan Penggalian Riil ⁴⁾ (IAGDt)
1973/74	851,0	15,40	26,78	57,51
1974/75	2.374,0	35,15	29,84	117,78
1975/76	2.484,0	30,63	32,91	93,08
1976/77	2.930,0	30,15	35,97	83,81
1977/78	3.599,7	33,05	39,04	84,66
1978/79	4.357,6	35,79	42,10	85,01
1979/80	6.979,6	47,44	45,16	105,05
1980/81	11.672,5	67,81	48,23	140,59
1981/82	12.970,6	68,40	51,30	133,34
1982/83	11.707,8	56,84	54,36	104,56
1983/84	16.107,4	69,01	57,43	120,17
1984/85	16.937,6	69,97	60,49	115,67
1985/86	13.570,8	53,00	63,10	83,99
1986/87	11.502,8	41,16	66,62	61,78

Keterangan : 1) Nilai Tambah Bruto Produksi Pertambangan dan Penggalian atas dasar harga berlaku.

2) Nilai Tambah Bruto Produksi Pertambangan dan Penggalian atas dasar harga berlaku dibagi IBH/IHK.

3) Persamaan Jangka Panjangnya :

$$\hat{PdP} = 23,7144 + 3,0647 t$$

4) Fluktuasi terhadap trend jangka panjangnya.

Sumber : Departemen Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN 1990/91 dan dari Tabel 4.1.

Terus menurunnya pertumbuhan produksi pertambangan dan penggalan disebabkan terus menurunnya permintaan dunia terhadap komoditi minyak dan gas bumi sebagai komoditi utama pos produksi pertambangan dan penggalan. Hal ini ditunjukkan pula oleh semakin menurunnya angka fluktuasi produksinya terhadap trend jangka panjangnya dalam dua tahun terakhir periode penelitian, yang mencerminkan terjadinya penurunan penawaran produksi pertambangan dan penggalan (lihat Tabel 4.16).

Mengingat sangat pekanya perekonomian Indonesia terhadap fluktuasi permintaan dan produksi minyak dan gas bumi terutama pengaruhnya terhadap penerimaan pemerintah dan penerimaan devisa negara, maka tentunya hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan tingkat harga umum.

4.3 Tinjauan Perkembangan Kebijakan Ekonomi di Indonesia Tahun 1974/75 - 1986/87

4.3.1. Perkembangan Kebijakan Anggaran

4.3.1.1. Kebijakan Penerimaan Pemerintah

Paket kebijakan anti-inflasi 9 April 1974 yang dilaksanakan pemerintah tak hanya mencakup kebijakan moneter saja, melainkan juga kebijakan anggaran dan kebijakan di bidang penawaran. Kebijakan anti-inflasi

di bidang anggaran pemerintah didasarkan pada prinsip untuk menciptakan surplus anggaran pemerintah guna melunasi utang pada Bank Indonesia dalam bentuk uang muka kepada pemerintah. Oleh karena itu, penerimaan pemerintah harus ditingkatkan dan pengeluaran ditekan.

Peningkatan penerimaan pemerintah diharapkan dapat diperoleh melalui peningkatan tarif pajak dari pajak penjualan atas barang jadi dan konsumsi barang mewah, cukai tembakau, bea masuk atas kendaraan bermotor, MPD (Menghitung Pajak Orang), pajak perseroan bagi perdagangan ekspor dan terutama berasal dari meningkatnya PPs minyak. Sementara itu, untuk menekan tingginya tingkat harga dalam negeri, dilakukan penerunan dan penghapusan tarif pajak penjualan dalam negeri, dilakukan penurunan dan penghapusan tarif pajak penjualan dan negeri untuk jenis barang sangat esensial dan jenis barang esensial. Selama Pelita II, penerimaan pemerintah yang berasal dari bantuan/pinjaman luar negeri dan PPs minyak meningkat cukup cepat. Tingginya laju peningkatan penerimaan luar negeri itu dibandingkan dengan laju peningkatan penerimaan domestik menyebabkan makin membesarnya defisit domestik anggaran pemerintah.

Kebijaksanaan penerimaan pemerintah dalam rangka menekan laju inflasi ini nampaknya memberikan hasil yang agak kontradiktif ; terutama bila dihubungkan dengan hasil pengujian hipotesis bahwa defisit domestik anggaran pemerintah sebaiknya diturunkan guna mengekang laju inflasi. Turunnya penerimaan pajak penjualan atas barang-barang esensial dan sangat esensial tak cukup diimbangi oleh peningkatan pajak langsung. Akibatnya, penerimaan domestik meningkat tidak secepat peningkatan penerimaan luar negeri, sementara pengeluaran domestik juga meningkat lebih cepat. Turunnya laju inflasi setelah kebijaksanaan itu nampaknya lebih disebabkan oleh penyedotan jumlah uang beredar dan pemberian subsidi serta pengaturan persediaan bahan-bahan pokok.

Memasuki awal tahun pertama Pelita III, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan perpajakan 27 Maret 1979, guna meningkatkan penerimaan domestik pemerintah, melalui perubahan beberapa tarif pajak dan pemberian insentif berupa keringanan pajak bagi perusahaan yang menggunakan jasa akuntan publik. Akan tetapi, kebijaksanaan perpajakan yang dikeluarkan pada bulan April 1979 tentang penurunan tarif pajak penjualan menjadi

1 % dan 5 % bagi barang-barang yang masih kena pajak, nampak kurang sejalan dengan paket kebijaksanaan 27 Maret 1979 tersebut. Dengan tarif pajak yang rendah itu, penerimaan pajak penjualan menjadi sangat kecil.

Turunnya harga minyak OPEC di pasaran dunia, mau tak mau, memukul Indonesia yang penerimaan pemerintahnya sebagian besar berasal dari PPS minyak. Akibat penurunan tersebut, peran penerimaan pemerintah dari migas juga terus menurun dari 56,90 % pada tahun 1982/83 menjadi 48,82 % tahun 1985/86, bahkan turun lagi menjadi 28,95 % pada tahun 1986/87 (lihat kembali Tabel 4.6).

Bantuan dan pinjaman luar negeri, yang juga merupakan penerimaan luar negeri pemerintah, menunjukkan perkembangan yang agak fluktuatif. Setelah meningkat dua kali lipat pada tahun 1983/84, lalu turun kembali untuk tahun berikutnya, dan sejak tahun 1985/86 nilainya secara absolut meningkat terus, hingga menjadi Rp 5,75 triliun pada tahun 1986/87. Ini menunjukkan betapa ketatnya kendala bagi tersedianya dana domestik untuk pembangunan pemerintah.

Oleh karena itu, sejak awal tahun 1984, dikeluarkan serangkaian kebijaksanaan perpajakan baru guna meningkatkan penerimaan domestik

pemerintah dengan cara mengintensifkan pungutan pajak dan memperluas sumber-sumber penerimaannya. Pada tahun 1983, tiga buah Undang-undang perpajakan dikeluarkan untuk menggantikan sistim perpajakan lama. Ketiganya adalah Undang-undang tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 6 tahun 1983), UU tentang Pajak Penghasilan (UU No. 7 tahun 1983) dan UU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU No.8 tahun 1983). Sebagai tambahan, pemerintah mengeluarkan juga peraturan baru mengenai tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada awal tahun 1986, menggantikan IPEDA dan pajak Kekayaan. Secara umum, sistim perpajakan yang baru ini memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan domestik pemerintah.

4.3.1.2. Kebijakan Pelaksanaan Pengeluaran Pemerintah

Dalam rangka menekan inflasi, seyogyanya pengeluaran pemerintah diarahkan untuk mengekang pertumbuhan defisit domestik anggaran pemerintah. Pedoman yang dapat digunakan adalah pemanfaatan dana yang ada untuk membiayai pengeluaran yang produktif, dan mengurangi atau menghilangkan pengeluaran yang kurang perlu, yang hanya merupakan pemborosan.

Perkembangan peran pengeluaran rutin pemerintah menunjukkan penurunan dari 51,37 % pada tahun 1974/75 menjadi 50,29 % dan 48,65 % pada tahun 1979/80 dan 1984/85. Akan tetapi meningkat pada tahun 1985/86 dan 1986/87 menjadi 52,36 % dan 61,94 %.

Belanja pegawai menunjukkan laju pertumbuhan yang menurun dari 31,45 % per tahun selama Pelita II, menjadi 23,40 % per tahun selama Pelita III dan terus menurun 3 tahun berikutnya dengan laju pertumbuhan rata-rata 16,56 % per tahun. Belanja barang menunjukkan perkembangan yang serupa, yaitu terus menurun dari 33,57 % menjadi 21,09 % dan 9,14 %. Demikian pula yang terjadi pada komponen penerimaan rutin yang lain. Subsidi daerah otonom laju pertumbuhannya mengalami penurunan dari 39,77 % pada Pelita II menjadi 24,85 % dan 22,77 % per tahun pada Pelita III dan 3 tahun terakhir periode penelitian. Pengeluaran rutin lain-lain yang salah satu komponennya adalah subsidi BBM, pertumbuhannya fluktuatif. Pada Pelita II, laju pertumbuhan rata-ratanya 24,81 % per tahun, melonjak menjadi 47,06 % untuk kemudian terus menurun empat kali lipat pada tahun 1986/87 dari tahun sebelumnya. Subsidi BBM yang merupakan selisih antara harga

riel BBM dengan harga jual di dalam negeri, menunjukkan kecenderungan meningkat sejak tahun 1977/78 hingga tahun 1981/82. Kemudian hampir setiap tahun pemerintah melakukan kebijaksanaan penyesuaian harga BBM dalam negeri untuk menekan besarnya subsidi yang membengkak. Penyesuaian harga BBM dalam negeri, di satu pihak memang menyebabkan naiknya tingkat harga umum, tetapi di lain pihak berarti penghematan pengeluaran pemerintah guna menunjang pembangunan, dan dalam jangka panjang justru dapat memperkuat perekonomian Indonesia.

Peran pembayaran bunga dan cicilan utang sampai tahun 1977/78 menunjukkan laju yang menurun, melonjak menjadi 10,1% pada tahun 1978/79, lalu turun dengan laju 8,5% pada tahun 1979/80 untuk kemudian naik lagi dengan laju 11,5% sejak tahun 1983/84. Peningkatan peran pembayaran bunga dan cicilan utang pada tahun 1978/79 dan 1983/84 terutama karena adanya devaluasi rupiah terhadap dollar AS, terlihat dari meningkatnya nilai rupiah pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri. Sedangkan peningkatan yang terjadi selama 1984/85 - 1986/86, sangat erat kaitannya dengan turunnya harga minyak OPEC dan depresiasi nilai US\$ terhadap

mata uang negara maju seperti yen dan mark Jerman.

Peran pengeluaran pembangunan sejak tahun 1975/76 selalu lebih besar daripada pengeluaran rutin, kecuali untuk tahun 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1985/86 dan 1986/87. Ini mencerminkan usaha pemerintah untuk mendorong pembangunan melalui peningkatan perannya sebagai agent of development.

Secara umum, kebijaksanaan pengeluaran pemerintah nampaknya telah cukup mengarah pada pengurangan pengeluaran domestik yang kurang perlu. Penghematan yang cukup terlihat adalah dalam belanja barang, pengurangan subsidi BBM, penundaan dan penjadwalan kembali proyek-proyek besar mengingat agak terbatasnya dana pembangunan pemerintah.

Defisit domestik anggaran pemerintah menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Sejak tahun 1974/75 - 1981/82, tercatat meningkat sepuluh setengah kali lipat, turun pada tahun 1982/83, kemudian meningkat lagi hingga tahun 1985/86, dan di akhir periode penelitian defisit domestik anggaran pemerintah menurun lagi.

Kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan anggaran, dalam rangka mengendalikan

inflasi, secara umum nampaknya kurang berperan. Peningkatan yang pesat dalam defisit domestik ini terutama bersumber pada meningkat pesatnya pengeluaran domestik sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sementara penerimaan domestik masih lemah. Penurunan cukup besar yang terjadi pada tahun 1986/87 lebih disebabkan oleh penurunan pengeluaran domestik dan bukan oleh meningkatnya pendapatan domestik.

4.3.2. Perkembangan Kebijakan Ekonomi Lainnya

Perkembangan tingkat harga internasional pada dasarnya tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah, sementara pengaruh perubahannya pada neraca pembayaran menyebabkan pemerintah dapat sedikit mengendalikan perkembangan neraca pembayaran, terutama sehubungan dengan aspek moneterinya. Selain dari kebijaksanaan neraca pembayaran yang dapat dilakukan pemerintah guna mempengaruhi tingkat harga umum, pengendalian nilai tukar valuta asing mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kebijaksanaan anggaran dan inflasi.

Devaluasi mata uang rupiah telah dilakukan tiga kali selama periode penelitian, yakni sebesar 50,6 % tahun 1978, 28 % tahun 1983 dan 31 % tahun 1986. Kebijakan devaluasi yang cukup besar ini

tampaknya memberikan pengaruh negatif bagi usaha pengendalian laju inflasi, walaupun kebijaksanaan itu sudah mendesak dan harus dilakukan akibat dari nilai rupiah yang sudah terlalu lama dipertahankan. Kebijaksanaan devaluasi ini telah menyebabkan timbulnya tekanan inflasi biaya dan secara tidak langsung menyebabkan terjadinya ekspansi jumlah uang beredar.

Kebijaksanaan perdagangan luar negeri ditujukan untuk meningkatkan penerimaan ekspor nonmigas, di samping pemenuhan kebutuhan bahan baku dan barang modal bagi industri. Kebijakan-kebijaksanaan yang mendorong peningkatan ekspor nonmigas dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap ekspor minyak dan gas bumi. Berbagai kebijaksanaan yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor, memperlancar penyediaan bahan baku industri dalam negeri, dan penghematan devisa melalui pengetatan pengeluaran jasa-jasa, telah dilakukan pemerintah. Subsidi dalam bidang perdagangan luar negeri, seperti pemberian fasilitas sertifikat ekspor (SE), dan penurunan pajak ekspor tambahan, keringanan bea masuk diharapkan dapat menekan tingkat harga dan mempertinggi daya saing komoditi ekspor di pasaran dunia. Keluarnya Instruksi Presiden No. 4 tahun 1985 tentang

penyederhanaan prosedur dan administrasi lalu lintas barang di pelabuhan nampak cukup mengenai sasaran guna menekan tingginya biaya dengan menghilangkan ketidakefisienan yang terjadi akibat terlalu banyaknya peraturan yang membatasi, sehingga produk ekspor Indonesia dapat bersaing di dunia internasional.

Beberapa perubahan yang dilakukan sejak INPRES No. 4/1985 sampai kebijaksanaan PAKDES (Paket Desember 1987) antara lain penyederhanaan prosedur lalu lintas barang di pelabuhan, penyederhanaan daftar tarif bea masuk, penghapusan sistem sertifikat ekspor, penghapusan cukup banyak pembatasan lisensi impor dan pemberian berbagai kemudahan untuk kegiatan ekspor. Kebijakan itu dirasakan perlu untuk menjaga produk ekspor Indonesia setelah devaluasi tahun 1986.

BAB V
ANALISIS PENAKSIRAN MODEL INDONESIA
TAHUN 1974/75 - 1986/87

5.1 Analisis Hasil Regresi

Hasil regresi ekonometri dan modifikasinya, dengan menggunakan data Indonesia selama tahun 1974/75 - 1986/87 dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.

5.1.1 Analisis Ekonometri

Mula-mula digunakan variabel tingkat harga umum (P_t) sebagai variabel tak bebas (dependent variable) dan secara bergantian ditambah variabel fluktuasi produksi bahan makanan ($ITBM_{t-1}$) dan fluktuasi produksi minyak dan gas bumi (IPP_{t-1}) kedalam persamaan yang telah mempunyai dua variabel bebas (independent variable) yaitu variabel tingkat harga internasional (IHI_t) dan variabel defisit domestik anggaran pemerintah ($DDAP_t$). (Lihat persamaan (1), (2) dan (3) pada Tabel 5.1)

Tabel 5.1
Hasil Regresi 6 Persamaan

No	Variabel tak Bebas	konstanta	IHI_t	$DDAP_t$	$IDDAP_t$	$ITEM_{t-1}$	IPP_{t-1}	R^2	R^2_{adj}	SER	FStat	DW stat
1	P_t	47,7514	0,3298 (4,711) ***	0,0166 (5,337) ***				0,9741	0,9689	12,5318	187,859	1,3383
2	P_t	51,0015	0,3290 (4,363) ***	0,0166 (4,957) ***		-0,0303 (-0,50)		0,9741	0,9654	13,2078	112,748	1,3447
3	P_t	16,3462	6,3748 (5,029) ***	0,0119 (2,624) **			0,3807 (1,382) *	0,9786	0,9715	11,9985	137,256	1,3702
4	P_t	47,7525	0,3297 (4,710) ***		0,1909 (5,337) ***			0,9741	0,9689	12,5316	187,864	1,3383
5	P_t	50,9912	0,3290 (4,363) ***		0,1905 (4,957) ***	-0,0302 (-0,050)		0,9741	0,9654	13,2076	112,750	1,3447
6	P_t	16,3428	0,3748 (5,029) ***		0,1366 (2,624) ***		0,3808 (1,382) *	0,9786	0,9715	11,9977	137,274	1,3701

Keterangan : angka dalam kurung adalah t statistik
 * = signifikan secara statistik pada derajat 15 %
 ** = signifikan secara statistik pada derajat 5 %
 *** = signifikan secara statistik pada derajat 1 %

Dari persamaan-persamaan tersebut terlihat bahwa penambahan variabel IPP_{t-1} memperbaiki hasil regresi, sedangkan pemasukan variabel $ITBM_{t-1}$ memperburuk hasil regresi. Ini terlihat dari besarnya R^2 adjusted yang naik dari 0,9648 menjadi 0,9715 sewaktu IPP_{t-1} dimasukkan, dan turun menjadi 0,9654 sewaktu $ITBM_{t-1}$ dimasukkan. Pada persamaan (2) juga terlihat, bahwa koefisien variabel $ITBM_{t-1}$ tidak signifikan, sementara persamaan (3) semua koefisien variabel bebasnya signifikan, baik t-test maupun F-testnya. Penggantian variabel $DDAP_t$ dengan variabel $IDDAP_t$ (Indeks perkembangannya) tak mengubah hasil regresi, kecuali besarnya koefisien variabel defisit domestik anggaran pemerintah yang berubah karena adanya perbedaan satuan (lihat persamaan (4), (5) dan (6)).

Untuk keseluruhan hasil regresi yang dilakukan, terlihat bahwa angka R^2 maupun R^2 adjusted cukup tinggi, begitu pula F-test yang selalu signifikan. Tidak signifikannya koefisien variabel $ITBM_{t-1}$ menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak dapat menerangkan perubahan tingkat harga umum, akibat dari cukup ketatnya pengaturan harga dan produksi bahan makanan oleh pemerintah. Tampaknya variabel bebas lain diluar variabel $ITBM_{t-1}$ cukup baik menerangkan perubahan tingkat harga umum.

Keenam persamaan hasil regresi pada Tabel 5.1 dapat diringkaskan menjadi dua persamaan saja yang cukup baik untuk dianalisis lebih lanjut (lihat Tabel 5.2). Perbedaan antara persamaan (1) dan (2) hanya dalam hal salah satu variabel bebasnya saja yang berbeda, yaitu antara defisit domestik anggaran pemerintah dan indeks perkembangannya. Perubahan variabel bebas $DDAP_t$ menjadi $IDDAP_t$ ternyata tak mengubah ukuran-ukuran ekonometri yang ada, kecuali koefisien $DDAP_t$ atau koefisien $IDDAP_t$ saja.

Tabel 5.2

Hasil Regresi 2 Persamaan

No	Variabel tak Bebas	konstanta	IHI_t	$DDAP_t$	$IDDAP_t$	$ITEM_{t-1}$	IPP_{t-1}	R^2	R^2_{adj}	SER	F Stat	DW stat
1	P_t	16,3462	0,3748 (5,029) ***	0,0119 (2,624) **			0,3807 (1,382) ‡	0,9786	0,9715	11,9985	137,256	1,3702
2	P_t	16,3428	0,3748 (5,029) ***		0,1366 (2,624) **		0,3808 (1,382) ‡	0,9786	0,9716	11,9977	137,254	1,3701

Sumber : Tabel 5.1

Nilai R^2 dan R^2 adjusted yang besar menunjukkan, bahwa variabel bebas cukup dapat menerangkan

variabel tak bebas dengan baik. Besarnya nilai F - statistik (sangat signifikansi dengan derajat keyakinan sebesar 1%) menunjukkan bahwa memang secara bersama-sama, variabel $IH1_t$. (Lihat Tabel 5,3). Pengujian secara sendiri-sendiri terhadap koefisien variabel bebasnya memberikan hasil yang cukup memuaskan. Ini berarti variabel bebasnya secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh dan dapat menjelaskan variabel tak bebasnya.

Tabel 5.3

Nilai Balas Kritis untuk Student Test (t - test)
dan untuk Fisher Test (F - test)

a. Student Test

dof	α	0,15	0,05	0,01	Persamaan Tabel 5.1	Persamaan Tabel 5.2
9		1,100	0,833	2,821	2,3,5,6	-
10		1,093	4,10	2,764	1,4	1, 2
		*	**	***		

b. Fisher Test

n_2	n_1	$\alpha = 0,05$	$\alpha = 0,01$	Persamaan Tabel 5.1	Persamaan Tabel 5.2
9	3	3,86	6,99	2,3,5,6	-
10	2	4,10	7,56	1,4	1, 2

Keterangan :

- n_1 = derajat bebas pembilang
- n_2 = derajat bebas penyebut
- * = tanda signifikansi

5.1.2 Analisis Ekonomi

Dari hasil pengujian ekonometrik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan cukup baik untuk menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga umum (P_t). Dari keempat variabel utama yang dimasukkan kedalam model, ternyata hanya tiga macam saja yang signifikan, sedangkan $ITBM_{t-1}$ sama sekali tidak signifikan dan dikeluarkan dari dalam model. Berarti memang benarlah bahwa tingkat harga umum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat harga internasional (IHI_t), defisit domestik anggaran pemerintah ($DDAP_t$) maupun indeks perkembangannya ($IDDAP_t$) dan fluktuasi produksi minyak dan gas bumi (IPP_{t-1}). Fluktuasi produksi bahan makanan ($ITBM_{t-1}$) tampaknya tidak mempengaruhi tingkat harga umum. Walaupun tidak signifikan, tetapi dapat diperoleh suatu kesimpulan yaitu bahwa hubungan antara tingkat harga umum dan fluktuasi produksi bahan makanan adalah negatif. Ini berarti memang ada kecenderungan terjadinya gerak yang berlawanan antara kedua variabel tersebut, yaitu bila produksi bahan makanan melimpah maka tingkat harga umum akan turun walaupun belum bisa diartikan bahwa turunnya tingkat harga umum itu akibat melimpahnya tingkat produksi bahan makanan.

Dari hasil regresi persamaan (1), terlihat bahwa perubahan tingkat harga umum searah dengan perubahan tingkat harga internasional, defisit domestik anggaran pemerintah serta fluktuasi produksi minyak dan gas bumi. Perubahan 1 unit didalam indeks harga internasional (setelah memperhitungkan perubahan kurs rupiah terhadap dollar Amerika), menyebabkan tingkat harga umum berubah sebesar 0,3748 unit. Perubahan defisit domestik anggaran pemerintah sebesar Rp 1 milyar menyebabkan tingkat harga umum berubah sebesar 0,0119 unit, sedangkan perubahan indeks defisit domestik anggaran pemerintah sebesar 1 unit maka akan menyebabkan perubahan indeks harga umum sebesar 0,1366 unit. Demikian pula, fluktuasi produksi minyak dan gas bumi akan menyebabkan perubahan tingkat harga umum sebesar 0,3807 unit. Kesemuanya itu terjadi tentunya dengan asumsi dapat dipisahkannya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya, tanpa adanya saling mempengaruhi antar variabel bebas.

Dari perbandingan pengaruh parsial variabel bebas terhadap tingkat harga umum, bila terjadi perubahan variabel bebas dalam satuan dan besaran yang sama, maka fluktuasi produksi minyak dan gas bumi memberikan pengaruh terbesar terhadap tingkat harga umum, disusul oleh tingkat harga internasional dan defisit domestik anggaran pemerintah.

Berikut ini digunakan metode dekomposisi perubahan tingkat harga umum menurut sumber utamanya selama tahun 1974/1975-1986/1987 yang merupakan periode observasi (lihat tabel 5.6 dan 5.7).

Dekomposisi yang menggunakan variabel $DDAP_t$ dan $IDDAP_t$ memberikan hasil yang sama besarnya, walaupun terdapat perbedaan, hanya persoalan pembulatan angka saja. Dari kedua tabel tersebut, terlihat bahwa selama tahun 1974/75-1986/87 perubahan tingkat harga umum sangat dipengaruhi oleh perubahan kurs (46,47%). Perubahan defisit domestik anggaran pemerintah berperan cukup besar pula yaitu sebesar 28,54%, sementara tingkat harga internasional (tanpa pengaruh perubahan kurs rupiah terhadap dollar AS) berperan sebesar 17,14%. Yang kecil perannya adalah fluktuasi produksi minyak dan gas bumi, hanya sebesar 4,76%.

Berdasarkan hasil ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa selama periode 1974/75-1986/87 perubahan kurs menempati urutan pertama faktor penyebab inflasi di Indonesia, kemudian berturut-turut defisit domestik anggaran pemerintah, tingkat harga internasional dan terakhir fluktuasi produksi minyak dan gas bumi.

Tabel 5.6
Perkiraan Pengaruh Perubahan Variabel Bebas Pada Tingkat Harga Limun (P_t)
1974/75 - 1986/87
(Persamaan 1)

Tahun	Data Aktual						Perubahan P_t Aktual Pengaruh Dari :				
	HI_t	IKR_t	$DDAP_t$	IPP_{t-1}	P_t	ΔP_t	ΔHI_t	ΔIKR_t	$\Delta DDAP_t$	ΔIPP_{t-1}	Lainnya
1974/75	79,81	1,0000	578,1	57,51	67,54						
1975/76	90,70	1,0000	781,2	117,78	81,11	13,57	4,08	0	2,42	22,94	-15,87
1976/77	92,36	1,0000	921,6	93,08	97,17	16,06	0,62	0	1,67	-9,40	23,17
1977/78	101,05	1,0000	1.150,3	83,81	108,93	11,76	2,86	0	2,72	-3,53	9,71
1978/79	105,96	1,0652	1.138,1	84,66	121,77	12,84	2,38	2,59	-0,45	0,32	7,7
1979/80	110,65	1,5013	2.489,3	85,01	147,14	25,37	2,64	18,26	16,08	0,13	-11,74
1980/81	125,48	1,5108	4.958,0	105,05	172,14	25,00	8,39	0,45	29,38	7,63	-20,85
1981/82	135,73	1,5223	6.130,1	140,59	189,63	17,49	5,85	0,59	13,95	13,53	-16,43
1982/83	132,93	1,5936	5.363,4	133,42	205,99	16,36	-1,67	3,56	9,12	-2,76	8,11
1983/84	125,99	2,1911	5.664,7	104,56	233,42	27,43	-5,70	28,21	3,59	-10,96	12,29
1984/85	130,41	2,4720	5.863,0	120,17	242,07	8,65	8,73	13,73	2,36	5,91	-22,08
1985/86	131,59	2,6520	6.292,8	115,67	256,07	14,00	1,17	8,88	5,13	-1,71	0,53
1986/87	132,62	3,0906	4.125,4	83,99	279,49	23,42	6,98	21,80	-25,78	-12,06	32,48
					211,95	36,33		98,07	60,49	10,49 %	7,02
					100 %	17,14%		46,27%	28,5%	4,95 %	3,3 %

Tabel 5.7
 Perkiraan Pengaruh Perubahan Variabel Bebas Pada Tingkat Harga Umum (P_t)
 1974/75 - 1986/87
 (Persamaan 2)

Tahun	Data Aktual						Perubahan P_t Aktual Pengaruh Dari :				
	HI_t	IKR_t	$IDDAP_t$	IPP_{t-1}	P_t	ΔP_t	ΔHI_t	ΔIKR_t	$\Delta IDDAP_t$	ΔIPP_{t-1}	Lainnya
1974/75	79,81	1,0000	50,26	57,51	67,54						
1975/76	90,70	1,0000	67,91	117,78	81,11	13,57	4,08	0	2,41	22,94	-15,87
1976/77	92,36	1,0000	80,12	93,08	97,19	16,06	0,62	0	1,67	-9,40	23,17
1977/78	101,95	1,0000	100,00	83,81	108,93	11,76	2,86	0	2,72	-3,53	9,71
1978/79	105,96	1,0652	98,94	84,66	121,77	12,84	2,38	2,59	-0,14	0,32	7,69
1979/80	110,66	1,5013	216,40	85,01	147,14	25,37	2,64	18,26	16,05	0,13	-11,71
1980/81	125,48	1,5108	431,02	105,05	172,14	25,00	8,39	0,45	29,32	7,53	-20,79
1981/82	135,73	1,5223	532,91	140,59	189,63	17,49	5,85	0,59	13,92	13,53	-16,40
1982/83	132,93	1,5938	466,26	133,34	205,99	16,36	-1,67	3,56	9,10	-2,76	8,13
1983/84	125,99	2,1911	492,45	104,56	233,42	27,43	-5,70	28,21	3,58	-10,96	12,30
1984/85	130,41	2,4720	509,69	120,17	242,07	8,65	8,73	13,73	2,35	5,91	-22,07
1985/86	131,59	2,6520	547,14	115,67	256,07	14,00	1,17	8,98	5,12	-1,71	0,54
1986/87	132,62	3,0906	358,78	83,99	279,49	23,42	6,98	21,80	-25,75	-12,06	32,45
						211,95	36,33	98,07	60,35	10,49 x	7,02
						100 x	17,14x	46,27x	28,5x	4,95 x	3,3 x

Defisit domestik anggaran pemerintah melalui aspek moneterinya menyebabkan ekspansi jumlah uang beredar, sehingga terjadi kelebihan penawaran di pasar uang. Kelebihan jumlah uang beredar ini, tercermin juga dalam kelebihan permintaan atas barang dan jasa di pasar barang, mendorong terjadinya inflasi permintaan. Terjadinya perkembangan defisit domestik anggaran pemerintah yang cukup tinggi (21,88% per tahun) tak dapat dilepaskan dari adanya peningkatan penerimaan minyak dan penerimaan pembangunan berupa bantuan/pinjaman luar negeri. Gejolak perekonomian dunia yang tercermin dalam perkembangan tingkat harga internasional, tersalur secara langsung ke dalam perkembangan tingkat harga umum, maupun secara tak langsung melalui pengaruh moneter dari neraca pembayaran. Dalam hal ini, perkembangan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar AS berperan meningkatkan tingkat harga umum, terutama sejak kebijaksanaan devaluasi mata uang rupiah terhadap dollar AS yang telah dilakukan tiga kali selama periode penelitian, yaitu tanggal 15 November 1978, 30 Maret 1983, dan 26 September 1986. Pengaruh devaluasi ini, disertai dengan beberapa kali penyesuaian harga BBM dalam negeri, menyebabkan terjadinya inflasi biaya.

Interaksi beberapa faktor tersebut, yaitu defisit domestik anggaran pemerintah, fluktuasi produksi minyak dan gas bumi, tingkat harga internasional dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, baik secara langsung maupun melalui ekspansi jumlah uang beredar, menyebabkan terjadinya inflasi di Indonesia.

Defisit domestik anggaran pemerintah mencerminkan pembiayaan pengeluaran domestik dengan menggunakan penerimaan luar negeri sehingga terjadi peningkatan jumlah uang primer. Peningkatan jumlah uang primer inilah yang menyebabkan ekspansi jumlah uang beredar, dan karena tak disertai oleh peningkatan permintaan akan uang yang sebanding, menyebabkan terjadinya disequilibrium di pasar uang. Disequilibrium ini tercermin juga di pasar barang dalam bentuk naiknya tingkat harga sehingga terjadi inflasi. Oleh karena itu, guna mengendalikan inflasi, perlu dilakukan pengelolaan anggaran pemerintah agar tidak terjadi defisit domestik, atau setidaknya mengurangi besarnya defisit domestik.

Defisit domestik, seperti dijelaskan sebelumnya, terjadi karena relatif sedikitnya penerimaan pemerintah (yang berorientasi pada perekonomian) domestik, sementara pengeluaran pemerintah (yang berorientasi pada perekonomian) domestik cukup

besar. Penerimaan pemerintah (yang berorientasi pada perekonomian) luar negeri sebagian dibelanjakan diluar negeri, sehingga terjadi sterilisasi penerimaan luar negeri dan sebagian dibelanjakan didalam negeri sehingga terjadi monetisasi penerimaan luar negeri.

Defisit domestik anggaran pemerintah dibiayai dengan surplus luar negeri, yang terdiri atas penerimaan migas dan penerimaan pembangunan dikurangi oleh cicilan bunga dan pokok pinjaman luar negeri, serta komponen luar negeri dari pengeluaran pemerintah lainnya, baik rutin maupun pembangunan.

Dilihat dari neraca pembayaran, surplus luar negeri anggaran pemerintah itu terbagi dalam neraca pembayaran, surplus luar negeri anggaran pemerintah itu terbagi dalam dua bagian, sebagian tercermin di dalam transaksi berjalan (current account) dalam bentuk ekspor dan impor barang dan jasa, dan sebagian lagi tercermin di dalam transaksi modal (capital account) dalam bentuk masuknya dana pinjaman luar negeri dan pembayaran pokok pinjaman luar negeri. Dalam kenyataannya, defisit domestik ini tidak selalu sama dengan surplus luar negeri. Selisih antara keduanya itu memberikan sumbangan pada perubahan cadangan valuta asing Bank Indonesia. Dalam hal terjadinya perubahan cadangan valuta asing

BI dan diimbangi oleh kenaikan kredit BI kepada pemerintah dalam rupiah, timbul monetisasi defisit domestik anggaran pemerintah yang menyebabkan inflasi. Semakin besar komponen luar negeri dalam pengeluaran pemerintah berarti semakin kecil kemungkinan terjadinya monetisasi defisit domestik anggaran, untuk selanjutnya tidak menyumbang pada inflasi secara langsung. Akan tetapi, inflasi secara tidak langsung dimungkinkan terjadi melalui harga barang-barang impor (imported inflation).

Sterilisasi pengaruh inflatoir dari defisit anggaran pemerintah dilakukan dengan membelanjakan penerimaan luar negeri di luar negeri, dalam bentuk impor. Ini tentunya harus disertai dengan peningkatan penerimaan ekspor yang cukup besar, bila tidak ingin timbul tekanan terhadap neraca pembayaran.

Tampak bahwa kendala anggaran pemerintah dewasa ini dan di masa mendatang adalah ketidak menentuan prospek pasaran minyak dunia dan membengkaknya utang luar negeri. Program penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah mengurangi defisit melalui pengetatan pengeluaran dan peningkatan penerimaan pajak non mogas, serta menggunakan dana pinjaman luar negeri seoptimal mungkin pada proyek-proyek yang produktif.

Faktor lain yang merupakan sumber utama inflasi di Indonesia adalah inflasi yang diimpor dan pengaruh harga BBM di dalam negeri. Inflasi yang di impor, yang tercermin dari perkembangan tingkat harga internasional, mempengaruhi perkembangan tingkat harga umum baik secara langsung maupun melalui perkembangan neraca pembayaran. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kebijaksanaan nilai tukar valuta asing memberikan pengaruh terbesar. Perkembangan tingkat harga internasional pada dasarnya tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah, sementara pengaruh perubahan pada neraca pembayaran, menyebabkan pemerintah dapat sedikit mengendalikan neraca pembayaran, terutama sehubungan dengan aspek moneternya. Selain dari kebijaksanaan neraca pembayaran yang dapat dilakukan pemerintah guna mempengaruhi tingkat harga umum, pengendalian nilai tukar valuta asing mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kebijaksanaan anggaran dan laju inflasi.

Devaluasi mata uang rupiah terhadap dollar AS yang telah dilakukan tiga kali selama periode penelitian telah menyebabkan timbulnya tekanan inflasi biaya dan secara tidak langsung menyebabkan terjadinya ekspansi jumlah uang beredar melalui pengaruhnya pada defisit domestik anggaran pemerintah. Devaluasi

akan langsung menyebabkan naiknya tingkat harga trade goods, maka devaluasi akan menyebabkan naiknya tingkat harga umum. Devaluasi juga mempengaruhi tingkat harga melalui pengaruhnya pada neraca pembayaran yang lebih lanjut menyebabkan meningkatnya uang primer, sehingga akhirnya permintaan agregat meningkat. Anggaran pemerintah pun terkena pengaruh devaluasi ini, dalam bentuk meningkatnya penerimaan luar negeri, terutama pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri, subsidi BBM, dan pengeluaran yang berasal dari bantuan proyek.

Hasil pengujian hipotesis tidak menunjukkan implikasi cukup pentingnya peran fluktuasi produksi tanaman bahan makanan, tetapi ini bukan berarti kebijaksanaan pengendalian produksi dan tingkat harga bahan makanan tidak baik dan tidak mencapai sasarannya. Justru sebaliknya, karena kebijaksanaan tersebut mampu memperkecil pengaruh fluktuasi produksi tanaman bahan makanan. Peralatan kebijaksanaan yang digunakan sebaiknya bukan melalui penetapan harga dan pemberian subsidi, melainkan melalui penyediaan stok nasional dan pengaturan produksi agar mekanisme pasar bekerja dengan semestinya. Di samping itu, penelitian untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi bahan makanan tetap terus dilakukan.

BAB VI

P E N U T U P

6.1 Kesimpulan

Secara umum, inflasi yang terjadi di Indonesia selama tahun 1974/75 - 1986/87 disebabkan oleh perkembangan defisit domestik anggaran pemerintah yang ditutupi dengan bantuan luar negeri, tingkat harga internasional yang dinilai dalam mata uang rupiah dan fluktuasi produksi minyak dan gas bumi. Pengaruh peningkatan ketiga sumber utama inflasi terhadap naiknya tingkat harga umum, disalurkan melalui peningkatan uang primer yang menyebabkan ekspansi jumlah uang beredar.

Komposisi jumlah uang beredar yang makin mengarah pada meningkatnya peran uang giral, akibat laju pertumbuhan uang giral yang lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan uang kartal, memperlihatkan bergesernya sektor moneter Indonesia ke arah sektor moneter yang lebih modern. Ini memberikan implikasi makin sukarnya pengendalian jumlah uang beredar dan makin meluasnya monetisasi kegiatan ekonomi subsisten, sehingga dapat memberikan kecenderungan meningkatnya laju inflasi di Indonesia. Hubungan yang erat antara jumlah uang beredar dengan tingkat harga umum tak disertai oleh hubungan yang erat antara jumlah uang beredar dengan laju inflasi. Tampaknya, jumlah uang beredar lebih merupakan variabel antara terhadap

perkembangan inflasi di Indonesia, di mana jumlah uang beredar menjembatani hubungan antara defisit domestik anggaran pemerintah atau neraca pembayaran dengan tingkat harga umum (juga inflasi), melalui aspek moneterinya.

Perkembangan defisit domestik anggaran pemerintah selama periode 1974/75 - 1986/87 ternyata cukup tinggi, dengan laju pertumbuhan rata-rata 21,88 % per tahun. Peningkatan ini bersumber pada lemahnya komponen domestik dalam penerimaan pemerintah disertai oleh peningkatan pengeluaran domestik sementara sumber-sumber luar negerinya meningkat cukup cepat. Peningkatan defisit domestik anggaran pemerintah mempengaruhi tingkat harga umum sebesar 28,54% (menurut perhitungan dekomposisi). Pengaruh defisit domestik anggaran pemerintah terhadap tingkat harga umum tersalurkan melalui variabel antara jumlah uang beredar.

Terjadinya imported inflation dalam perekonomian dapat terlihat dari cukup tingginya koefisien korelasi antara tingkat harga ekspor maupun tingkat harga impor terhadap tingkat harga umum, juga sangat tingginya koefisien korelasi antara tingkat harga internasional (setelah memperhitungkan pengaruh perkembangan nilai tukar valuta asing) dengan tingkat harga umum, serta sangat signifikannya koefisien regresi

tingkat harga internasional dan cukup besarnya pengaruh tingkat harga internasional terhadap tingkat harga umum.

Keterkaitan antara perkembangan defisit domestik anggaran pemerintah dengan imported inflation dalam mempengaruhi tingkat harga umum, nampak dalam cukup besarnya usaha sterilisasi penerimaan luar negeri pemerintah. Sterilisasi penerimaan luar negeri pemerintah untuk mengekang pengaruh ekspansif defisit domestik anggaran pemerintah terhadap jumlah uang beredar dilakukan dengan berbagai cara, seperti untuk pembiayaan impor atau untuk pembayaran bunga dan cicilan uang luar negeri. Akibatnya, pengaruh tingkat harga internasional tersalurkan ke dalam negeri, menyumbang pada peningkatan tingkat harga umum.

Pengaruh defisit domestik anggaran pemerintah dan tingkat harga internasional terhadap tingkat harga umum, tak terlepas dari perkembangan produksi serta harga minyak bumi. Fluktuasi produksi minyak dan gas bumi berpengaruh juga terhadap perkembangan tingkat harga umum, yang berarti mempengaruhi inflasi. Ini terbukti dari cukup signifikannya koefisien regresi yang diperoleh. Agak berbeda hasilnya dengan perkembangan produksi bahan makanan. Fluktuasi produksi bahan makanan, dari hasil regresi, terlihat tidak berpengaruh terhadap perkembangan tingkat harga

umum. Ini disebabkan oleh sangat ketatnya pengendalian harga bahan makanan yang dilakukan pemerintah.

6.2 Saran - saran

- Kebijakan anggaran seharusnya diarahkan pada pengekangan dan penurunan besarnya defisit domestik anggaran pemerintah. Dari sisi penerimaan pemerintah perlu diusahakan peningkatan sumber-sumber penerimaan domestik, terutama penerimaan domestik yang kurang/tidak memberikan pengaruh inflasi dalam perekonomian. Ini terutama dapat dicapai melalui peningkatan beberapa komponen pajak langsung, seperti pajak pendapatan dan pajak perseroan (pajak penghasilan). Usaha peningkatan peran penerimaan domestik pemerintah ini tak berarti harus mengabaikan sumber penerimaan luar negeri, apalagi mengingat perlu tetap dipertahankannya momentum pembangunan yang telah tercipta, dengan cara meningkatkan nilai riil pengeluaran pembangunan pemerintah. Kebijakan pengeluaran pemerintah, sesuai dengan sasaran pengendalian inflasi, perlu diarahkan pada pengurangan pengeluaran domestik pemerintah yang kurang begitu perlu, seperti belanja barang untuk keperluan pribadi pejabat-pejabat, subsidi BBM yang terlalu membangkakan dan proyek-proyek besar yang lebih bersifat prestise dari pada ekonomis.

- Kebijakan nilai tukar valuta asing perlu diarahkan pada penetapan nilai tukar yang realistis, untuk itu digunakan penyesuaian jangka pendek secara kontinyu yang kurang memberikan efek inflasi dibandingkan dengan penyesuaian drastis melalui kebijakan devaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sri Tua, *Banking and Money in Indonesia : An Econometric Study*, Sri Tua Arief Associates, Agustus, 1978.
- Bank Indonesia, *Laporan Mingguan*, beberapa penerbitan.
- _____, *Laporan Tahunan Pembukuan*, Jakarta, beberapa penerbitan.
- _____, *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*, Jakarta, beberapa penerbitan.
- Biro Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi*, Jakarta, beberapa penerbitan.
- _____, *Tabel Input-Output Indonesia*, Jakarta, tahun 1975, 1980 dan 1985 (3 edisi).
- Boediono, *Ekonomi Moneter*, BPFE, Yogyakarta, Oktober, 1985.
- Booth, Anne, and Peter Mc Cawley (eds.), *Ekonomi Orde Baru*, Alih Bahasa oleh Boediono, LP3ES, Jakarta 1982.
- Bulmer-Thomas, V., *A Model of Inflation in Central America*, *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, vol. 39(4), 1977.
- Chaipravat, Olarn, Kanitta Meesook, and Siri Ganjarerndee, *Main Sources of Inflation in Developing ESCAP Countries*, *Economic Bulletin for Asia and the Pacific*, vol. XXIX, no 1, June, 1978.
- Departemen Keuangan RI, *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1990/1991*
- Dutton, Daniel, *A Model of Self-Generating Inflation: The Argentina Case*, *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 3 (2), 1971.
- Gunawan, Anton Hermanto, *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*, PAU-Ekonomi-UI, Jakarta, 1991
- Hagger, A.J., *Inflation : Theory and Policy*, MacMillan, London, 1977.
- Hirschman, A.O, (ed.), *Latin American Issues: Essays and Comments*, The Twentieth Century Fund, 1961.

Lockett D.G, Money and Banking, Second Edition, McGraw Hill Kogakusha, 1977.

Nakamaru, Tomoichiro, Inflation in the Republic of Korea, the Philippines and Indonesia, EXIM Bank Review, vol 4, no. 1, Tokyo, October 1983.

Nasution, Anwar, Aspek Ekonomi Anggaran Belanja Negara, Prisma, no. 5, Mei 1984.

Otani, Ichiro, Inflation in an Open Economy: A Case Study of the Philippines, IMF Staff Papers, vol. XXII, no 3, November 1975.

Supranto, J, Ekonometrik Buku Dua, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 1984.

Tanzi, Vito, Inflation, Lags in Collection and the Real Value of Tax Revenue, IMF Staff Papers, vol. 24 (1), 1977.

Venieris, Yiannis P., and Frederick D. Sebold, Macroeconomic Models and Policy, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1977.

Wardhana, Ali, Inflasi dan Ketegangan-ketegangan Struktural, Hands-out Course PPN, FEUI, Jakarta, Mei 1974.

World Bank, Half-Yearly Revision of Commodity Price Forecasts and Quarterly Review of Commodity Markets, Office Memorandum, July 7 tahun, 1987.

_____, World Bank Tables 1991, 1991.

REGRESSION ANALYSIS

DATA FOR: B:REGRESI LABEL:
 OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 6

NAME	MEAN	STD.DEV.
IHit	191.6862	103.2104
DDAPt	3523.6692	2324.1330
IDDApt	306.3200	202.0412
ITBmt-1	98.5592	8.0208
IPPt-1	103.4377	22.9496
AR.: Pt	169.4208	71.0487

ENT VARIABLE: Pt

REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 10)	PROB.	PARTIAL r ²
.3298	.0700	4.711	.00083	.6893
.0166	.0031	5.337	.00033	.7401
NT 47.7514				

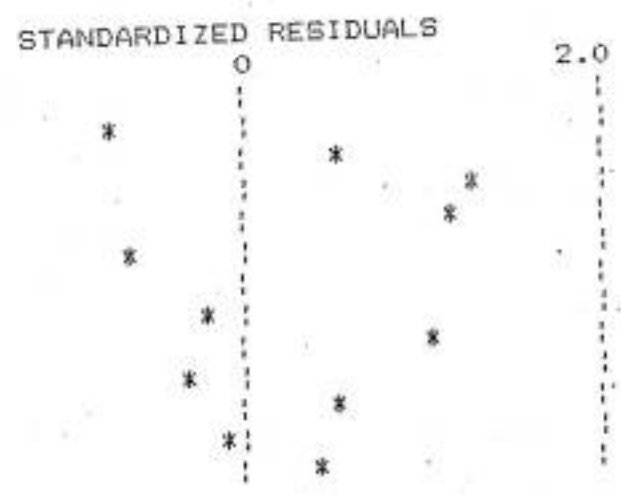
RROR OF EST. = 12.5318

ED R SQUARED = .9689
 R SQUARED = .9741
 MULTIPLE R = .9870

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
59004.6220	2	29502.3110	187.859	1.171E-08
1570.4493	10	157.0449		
60575.0713	12			

OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL
67.540	83.660	-16.1202
81.110	90.621	-9.5108
97.170	90.180	6.9898
108.930	93.315	15.6151
121.770	108.064	13.7063
147.140	154.230	-7.0899
172.140	192.707	-20.5673
189.630	191.815	-2.1847
205.990	192.831	13.1585
233.420	237.684	-4.2644
242.070	235.721	6.3486
256.070	257.443	-1.3729
279.490	274.198	5.2919



WATSON TEST = 1.3383

----- REGRESSION ANALYSIS -----

DATA FOR: B:REGRESI LABEL:
 OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 6

NAME	MEAN	STD.DEV.
IHI t	191.6862	103.2104
DDAPt	3523.6692	2324.1330
IDDAPt	306.3200	202.0412
ITBmt-1	98.5592	8.0208
IPPt-1	103.4377	22.9496
VAR.: Pt	169.4208	71.0487

DEPENDENT VARIABLE: Pt

REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 9)	PROB.	PARTIAL r ²
.3290	.0754	4.363	.00181	.6790
.0166	.0033	4.957	.00078	.7319
-1 -.0303	.6056	-.050	.96119	2.78077E-04
WT 51.0015				

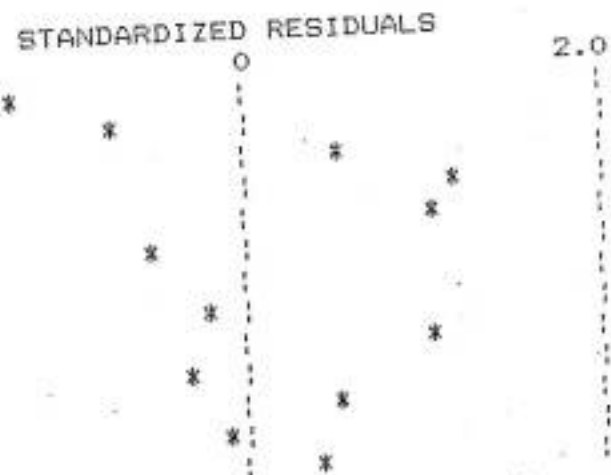
ERROR OF EST. = 13.2078

ADJUSTED R SQUARED = .9654
 R SQUARED = .9741
 MULTIPLE R = .9870

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	59005.0587	3	19668.3529	112.748	1.859E-07
RESIDUAL	1570.0126	9	174.4458		
TOTAL	60575.0713	12			

OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL
67.540	83.388	-15.8483
81.110	90.404	-9.2938
97.170	90.167	7.0034
108.930	93.438	15.4918
121.770	108.233	13.5373
147.140	154.545	-7.4046
172.140	193.065	-20.9248
189.630	191.700	-2.0703
205.990	192.756	13.2345
233.420	237.541	-4.1212
242.070	235.681	6.3887
256.070	257.400	-1.3300
279.490	274.153	5.3372



SHAPIRO-WILK TEST = 1.3447

REGRESSION ANALYSIS

DATA FOR: B:REGRESI LABEL:
 OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 6

NAME	MEAN	STD. DEV.
IHit	191.6862	103.2104
DDAPt	3523.6692	2324.1330
IDDAPt	306.3200	202.0412
ITBMt-1	98.5592	8.0208
IPPt-1	103.4377	22.9496
VAR.: Pt	169.4208	71.0487

DEPENDENT VARIABLE: Pt

REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 9)	PROB.	PARTIAL r ²
.3748	.0745	5.029	.00071	.7375
.0119	.0045	2.624	.02764	.4334
.3807	.2756	1.382	.20044	.1750
CONSTANT	16.3462			

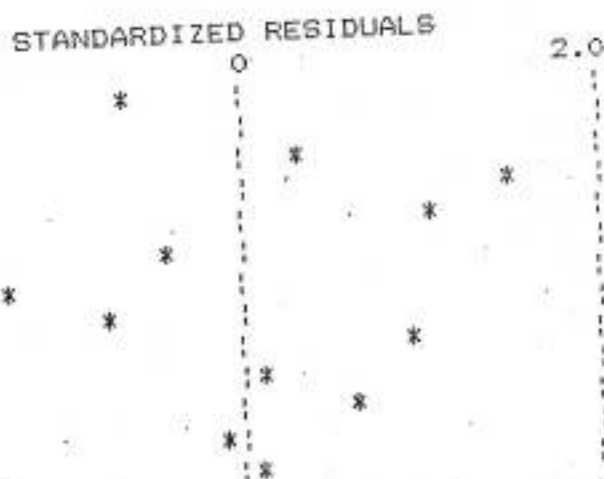
ERROR OF EST. = 11.9985

ADJUSTED R SQUARED = .9715
 R SQUARED = .9786
 MULTIPLE R = .9892

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	59279.3996	3	19759.7999	137.256	7.850E-08
RESIDUAL	1295.6717	9	143.9635		
TOTAL	60575.0713	12			

OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL
67.540	75.019	-7.4790
81.110	97.784	-16.6744
97.170	93.574	3.5958
108.930	92.012	16.9181
121.770	109.183	12.5867
147.140	152.358	-5.2179
172.140	186.492	-14.3519
189.630	198.715	-9.0848
205.990	194.574	11.4156
233.420	232.493	.9272
242.070	234.821	7.2493
256.070	257.537	-1.4670
279.490	277.908	1.5822



SHAPIRO-WILK TEST = 1.3702

REGRESSION ANALYSIS

DATA FOR: B:REGRESI LABEL:
 OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 6

NAME	MEAN	STD.DEV.
IHit	191.6862	103.2104
DDApt	3523.6692	2324.1330
IDDApt	306.3200	202.0412
ITBmt-1	98.5592	8.0208
IPPt-1	103.4377	22.9496
Pt	169.4208	71.0487

DEPENDENT VARIABLE: Pt

REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 10)	PROB.	PARTIAL r^2
.3297	.0700	4.710	.00083	.6893
.1909	.0358	5.337	.00033	.7401
47.7525				

STANDARD ERROR OF EST. = 12.5316

ADJUSTED R SQUARED = .9689
 R SQUARED = .9741
 MULTIPLE R = .9870

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	59004.6596	2	29502.3298	187.864	1.171E-08
RESIDUAL	1570.4117	10	157.0412		
TOTAL	60575.0713	12			

OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL
67.540	83.661	-16.1209
81.110	90.620	-9.5103
97.170	90.181	6.9891
108.930	93.316	15.6143
121.770	108.063	13.7066
147.140	154.229	-7.0887
172.140	192.711	-20.5708
189.630	192.711	-2.1748
205.990	191.805	13.1546
233.420	192.835	-4.2653
242.070	237.685	6.3470
256.070	235.723	-1.3737
279.490	257.444	5.2927
	274.197	

STANDARDIZED RESIDUALS

WATSON TEST = 1.3383

REGRESSION ANALYSIS

DATA FOR: B:REGRESI LABEL:
 OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 6

NAME	MEAN	STD.DEV.
IHit	191.6862	103.2104
DDAPt	3523.6692	2324.1330
IDDAPt	306.3200	202.0412
ITBmt-1	98.5592	8.0208
IPPt-1	103.4377	22.9496
Pt	169.4208	71.0487

DEPENDENT VARIABLE: Pt

REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 9)	PROB.	PARTIAL r^2
.3290	.0754	4.363	.00182	.6790
.1905	.0384	4.957	.00078	.7319
-.0302	.6056	-.050	.96132	2.76133E-04
WT	50.9912			

STANDARD ERROR OF EST. = 13.2076

ADJUSTED R SQUARED = .9654

R SQUARED = .9741

MULTIPLE R = .9870

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	59005.0932	3	19668.3644	112.750	1.859E-07
RESIDUAL	1569.9781	9	174.4420		
TOTAL	60575.0713	12			

OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL
67.540	83.390	-15.8499
81.110	90.404	-9.2940
97.170	90.167	7.0027
108.930	93.438	15.4915
121.770	108.232	13.5382
147.140	154.542	-7.4024
172.140	193.067	-20.9270
189.630	191.691	-2.0608
205.990	192.760	13.2303
233.420	237.542	-4.1225
242.070	235.683	6.3869
256.070	257.401	-1.3310
279.490	274.152	5.3378

STANDARDIZED RESIDUALS

WATSON TEST = 1.3447

REGRESSION ANALYSIS

DATA FOR: B:REGRESI LABEL:
 CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 6

NAME	MEAN	STD.DEV.
IHit	191.6862	103.2104
DDApT	3523.6692	2324.1330
IDDApT	306.3200	202.0412
ITBmt-1	98.5592	8.0208
IPPt-1	103.4377	22.9496
Pt	169.4208	71.0487

DEPENDENT VARIABLE: Pt

REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T (DF= 9)	PROB.	PARTIAL R ²
.3748	.0745	5.029	.00071	.7375
.1366	.0521	2.624	.02763	.4335
.3808	.2755	1.382	.20032	.1751
16.3428				

STANDARD ERROR OF EST. = 11.9977

ADJUSTED R SQUARED = .9715

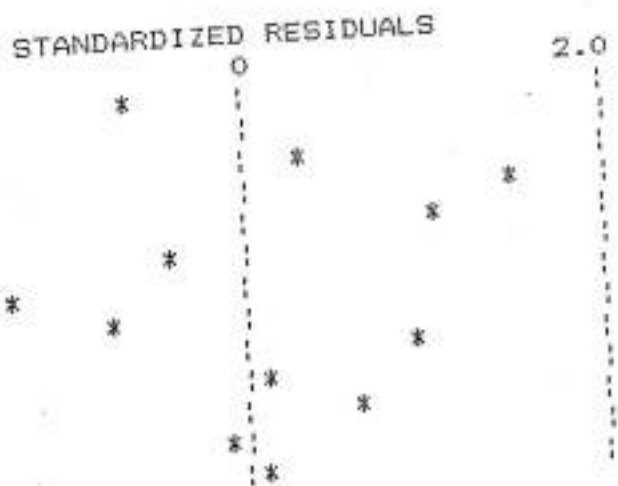
CRITERION R SQUARED = .9786

MULTIPLE R = .9892

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	59279.5670	3	19759.8557	137.274	7.845E-08
RESIDUAL	1295.5043	9	143.9449		
TOTAL	60575.0713	12			

OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL
67.540	75.018	-7.4780
81.110	97.785	-16.6747
97.170	93.575	3.5951
108.930	92.012	16.9179
121.770	109.183	12.5872
147.140	152.356	-5.2164
172.140	186.494	-14.3542
189.630	198.709	-9.0792
205.990	194.578	11.4117
233.420	232.493	.9273
242.070	234.822	7.2479
256.070	257.537	-1.4674
279.490	277.907	1.5828



WATSON TEST = 1.3701